



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2021**



Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim



<https://disbun.kaltimprov.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di Wilayah Indonesia Bagian Timur dan secara geografis Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km², terletak antara 113⁰35'31" dan 119⁰12'48" bujur timur, dan antara 2⁰34'23" lintang utara dan 2⁰44'14" lintang selatan. 119⁰00' Bujur Timur serta diantara 4⁰24' Lintang Utara dan 2⁰25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua dibagi menjadi 7 (Tujuh) Kabupaten. 3 (Tiga) kota, 103 kecamatan dan 841 desa serta 197 kelurahan. Tujuh Kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibukota Long Bagun. Sedangkan tiga kota adalah Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Sub Sektor Perkebunan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, ekologi maupun sosial dan budaya di Kalimantan Timur. Peranan tersebut semakin penting dan strategis karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang relatif tidak tergantung pada komponen impor. Kegiatan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dilaksanakan dengan berbagai pola pengembangan seperti pola Perkebunan Besar Swasta (PBS), Pola Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Rakyat yang dalam periode 2015–2019 telah memberikan hasil cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi. Produksi dan luas areal diperkirakan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya investasi baik dari swadaya murni masyarakat, bantuan pemerintah maupun Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan.

Pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur merupakan bagian pembangunan nasional, berorientasi pada upaya pembangunan ekonomi rakyat dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan sekaligus mendukung peningkatan ekspor yang berbasis bahan baku terbarukan dan ramah lingkungan.

Sampai dengan tahun 2021 luas areal perkebunan 1.517.300 Ha. Sejalan dengan pertambahan luas areal, maka sebagian tanaman produksinya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan luas areal yang produktif (tanaman menghasilkan) sebagai hasil kegiatan intensifikasi dan perluasan areal pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terus meningkat setiap tahunnya. Produksi Perkebunan tahun 2021 sebesar 17,46 juta ton. Hingga tahun 2021 luas areal kelapa sawit telah mencapai 1.359.016 ha. Sedangkan produksi sawit pada tahun 2021 mencapai 17,37 juta ton tandan buah segar (TBS). Komoditi lainnya, tanaman Karet merupakan tanaman tradisional di Kalimantan Timur yang sudah relatif lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Luas areal penanaman karet pada tahun 2021 tercatat seluas 118.626 ha dengan produksi seluruhnya berjumlah 70.010 ton karet kering.

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, lahan peruntukan perkebunan seluas 3.269.561 ha dengan luas yang telah dibebani ijin perkebunan seluas 2.748.708 ha, luas Ijin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 2.386.496 Ha dan luas Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.223.531 Ha. Adapun jumlah perkebunan besar swasta di Kalimantan Timur berjumlah 303 Perusahaan. Dilihat dari data tersebut, potensi pengembangan perkebunan masih besar.

1. Dasar Hukum

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua

lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur pada awal Pelita I (April 1969). Melalui Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1984 nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004. Perubahan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016.

2. Gambaran Umum

A. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membawahi Sekretariat, Bidang Pengembangan Komoditi, Bidang Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perkebunan Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan kebun;
- c. Pembinaan kegiatan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
- d. Pembinaan dan pengelolaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan;
- e. Pembinaan dan pengelolaan Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan,

pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Pengembangan Komoditi

Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengembangan komoditi. Bidang Pengembangan Komoditi membawahi:

- a. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan;
- b. Seksi Budidaya Tanaman; dan
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengolahan dan Pemasaran. Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi :

- a. Seksi Pengolahan Pasca Panen;
- b. Seksi Bimbingan Usaha; dan
- c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

5. Bidang Usaha

Bidang Usaha mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan. Bidang Usaha membawahi:

- a. Seksi Pembinaan Usaha;
- b. Seksi Penanganan Konflik Usaha; dan
- c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan.

6. Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program. Bidang Perkebunan Berkelanjutan membawahi:

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun;
- b. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan
- c. Seksi Konservasi Lahan dan Air.

7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan, pembinaan peredaran benih, pemantauan, evaluasi program dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi:

- a. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
- b. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi:

- a. Seksi Pengendalian OPT;
- b. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH;

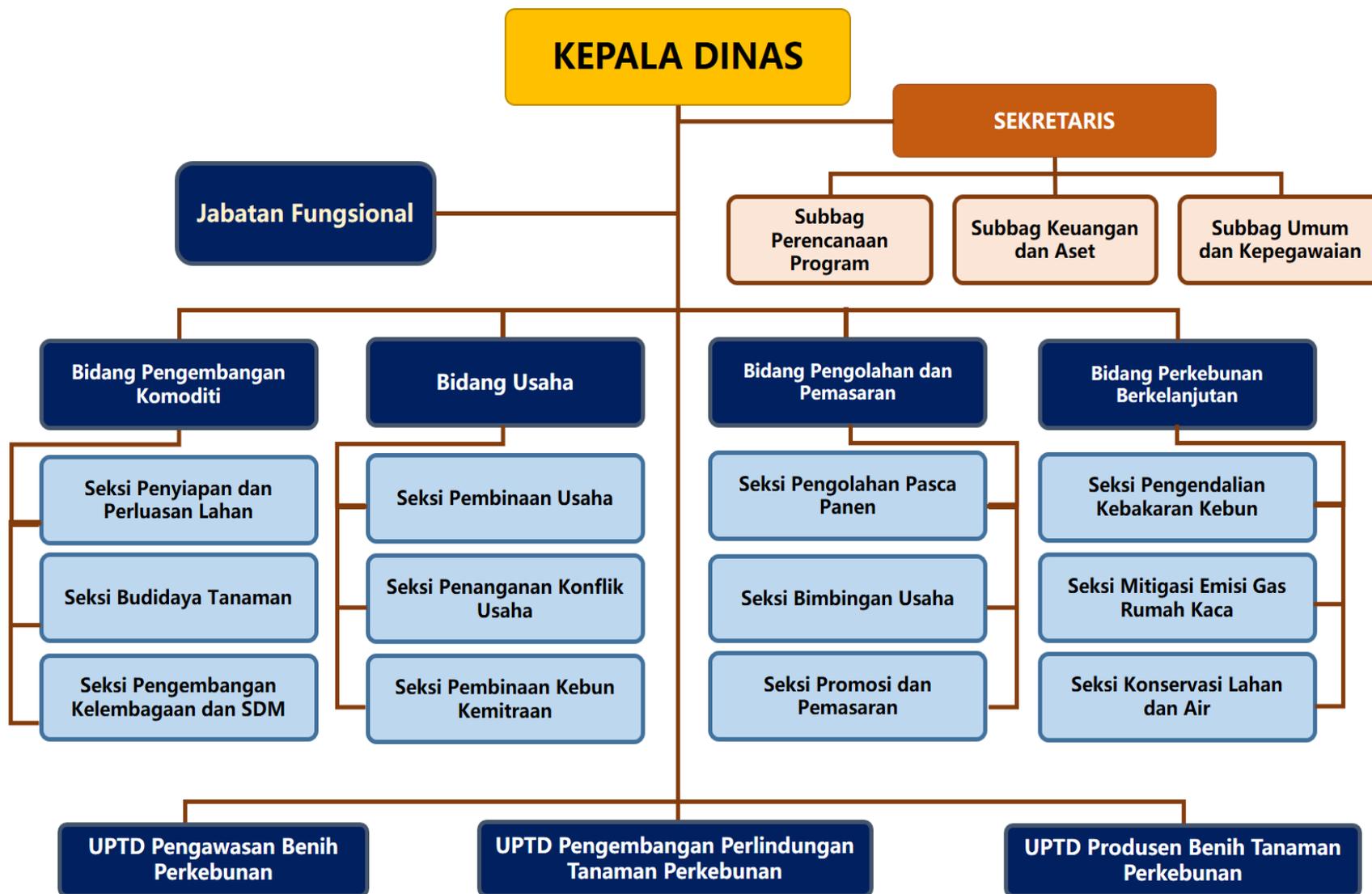
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam menyiapkan bahan tanaman perkebunan dan pemantauan, evaluasi program kerja serta melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan membawahi:

- a. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- b. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Pegawai berjumlah 111 (Seratus Sebelas) orang, dimana 76 (Tujuh Puluh Enam) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dan 35 Tenaga Teknis/Non Teknis, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	13	21	8	0	42
Wanita	4	26	4	0	34
Jumlah	17	47	12	0	76

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Gender

Gender	Eselon				Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV		
Pria	0	1	4	11	26	42
Wanita	0	0	2	11	21	34
Jumlah	0	1	6	22	47	76

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender

Gender	Pendidikan											Jumlah
	S3	S2	S1	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	0	10	16	0	0	2	0	0	14	0	0	42
Wanita	0	4	21	0	0	0	0	0	9	0	0	34
Jumlah	0	14	37	0	0	2	0	0	23	0	0	76

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan DIKLATPIM dan Gender

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	0	1	4	11	15
Wanita	0	0	3	5	8
Jumlah	0	1	7	16	23

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan Gender

Gender	JAFUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	0	0	4	0	4
Wanita	1	0	0	0	1
Jumlah	1	0	4	0	5

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga mempunyai Tenaga Kontrak sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) orang.

C. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik telah menyusun, menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur yang bersifat teknis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun SOP Dinas Perkebunan sebanyak 140

(Seratus Empat Puluh) SOP terdiri dari SOP Non Teknis sejumlah 72 (Tujuh Puluh Dua) dan SOP Teknis sejumlah 68 (Enam Puluh Delapan) dengan flowchart SOP sebagaimana terlampir.

D. Visi Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023, bahwa Renstra SKPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari renstra SKPD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra SKPD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai instansi pemerintah yang visioner, Dinas Perkebunan harus memiliki pandangan jauh ke depan dengan segala perencanaan dan realisasi untuk selalu berkarya dalam pembangunan daerah sehingga di setiap periode pembangunan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh komponen *stakeholder* pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2019-2023 adalah:

“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat”

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekuatan dalam memaknai kalimat di setiap rangkaian kata-katanya, bahwa Dinas Perkebunan sebagai instansi/lembaga naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan formulasi hasil analisis sektor perkebunan dalam kerangka pengembangan potensi daerah, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pokok, serta antisipasi isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yaitu **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**, sektor perkebunan berperan dalam mensukseskan misi 2 **"Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan"** dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka Dinas Perkebunan mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur dengan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, langkah pertama rencana strategis Dinas Perkebunan adalah menyepakati visi dan misi Dinas Perkebunan tahun 2019-2023 oleh seluruh staf Dinas Perkebunan maupun *stakeholders* yang mengacu pada visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Dimana misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

- a. Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional; dan
- b. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat incremental (terus meningkat) serta taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/ kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Berikut strategi dan kebijakan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023:

1. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan
 - Peningkatan produksi komoditi perkebunan
2. Menyediakan bahan baku untuk pemenuhan industri hilir
 - Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
3. Mempertahankan usaha perkebunan sebagai penggerak dan pemulihan ekonomi di masa Covid-19
 - Mendorong usaha perkebunan sebagai penopang ekonomi
4. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)
 - Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
5. Perluasan kebun diarahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah
 - Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
6. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
 - Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
7. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid
 - Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan
8. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan
 - Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan
 - Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan

9. Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan
 - Efektivitas mitigasi emisi GRK
 - Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan
 - Penanganan pengendalian kebakaran lahan perkebunan
 - Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan
10. Mengurangi kerugian hasil akibat serangan OPT
 - Penanganan hama dan penyakit
 - Pengembangan APH dan Biopestisida
11. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan
 - Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
12. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Memperpendek mata rantai pemasaran produk perkebunan rakyat
 - Memfasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha perkebunan
 - Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan
 - Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor
 - Membangun outlet-otlet pemasaran produk olahan perkebunan
13. Peningkatan fasilitasi pembangunan kebun rakyat
 - Pemberian bantuan padat karya pada pembangunan perkebunan rakyat

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur telah dibuat Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019 – 2023 beserta target-target yang ingin dicapai setiap tahunnya yang dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan baik yang dibiayai oleh APBN/BLN, APBD Murni dan APBD Perubahan, dimana dari tahun ketahun mengalami peningkatan anggaran yang cukup berarti untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perkebunan tersebut. Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Program ini mendukung dalam mewujudkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4) Administasi Umum Perangkat Daerah, meliputi 6 sub kegiatan

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi 1 sub kegiatan
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi 4 sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 3 meliputi sub kegiatan:
- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- b. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.
- c. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.
- d. Program penyuluhan pertanian. Program ini mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN.
 - 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi 2 sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
 - 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi 4 sub kegiatan:
 - a) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani;
 - b) Pendampingan Manajemen Koorporasi petani;

- c) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani;
dan
- d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.
- e. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi 3 sub kegiatan:
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- f. Program perizinan usaha pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi 1 sub kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Pencapaian Program Dan Kegiatan)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pilihan dimana penilaian akan Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada pencapaian kinerja program dan kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pembangunan sebagaimana penjabaran berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 23.838.334.677,- dari pagu 26.600.633.592,- dengan capaian keuangan 89,62% dan untuk capaian indikator kinerja (K) sebesar 103%. Program ini memiliki output Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan dengan capaian 89% dari target 86%. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator nilai akuntabilitas kinerja PD dengan capaian 72,63% atau 103,76% dari target 70%.

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator presentase ASN yang memiliki standar kompetensi dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 23% atau 115% dari target 20%;

- b. Pada UPTD PBP tercapai 100% atau 500% dari target 20%;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 50% atau 250% dari target 20%; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 20% atau 100% dari target 20%.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini memiliki indikator unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 5 unit atau 100% dari target 5 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini memiliki indikator jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 8 jenis atau 100% dari target 8 jenis;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 6 jenis atau 100% dari target 6 jenis;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 9 jenis atau 100% dari target 9 jenis;
dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini memiliki indikator jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

7 Kegiatan diatas di dukung dengan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yakni :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen perencanaan dan anggaran dengan capaian 10 dokumen atau 100% dari target 10 dokumen. Dokumen tersebut antara lain: DPA, RKA, DPPA, RKAP, RKT, Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, Pedoman Umum, Evaluasi Renja.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun dengan capaian 4 laporan atau 100% dari target 4 laporan. Dokumen tersebut antara lain: LkjIP, LPPD, Laporan Tahunan dan Laporan Statistik Perkebunan Tahun 2020.

c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan dengan capaian 28 dokumen atau 100% dari target 28 dokumen dan jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan.

d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 49 orang atau 98% dari target 50 orang;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 17 orang atau 94% dari target 18 orang;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 6 orang atau 75% dari target 8 orang; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 14 orang atau 93% dari target 15 orang.
- f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 114 unit atau 100% dari target 114 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 12 unit atau 100% dari target 12 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 75 unit atau 100% dari target 75 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 88 unit atau 100% dari target 88 unit.
- g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.
- h) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat dengan capaian 12 bulan atau

100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

i) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah barang cetak dan penggandaan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 47.240 lembar atau 100% dari target 47.240 lembar;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 500 lembar atau 100% dari target 500 lembar;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 13.100 lembar atau 100% dari target 13.100 lembar; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 2.960 lembar atau 100% dari target 2.960 lembar.

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 1.500 eksemplar atau 100% dari target 1.500 eksemplar;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 720 eksemplar atau 100% dari target 720 eksemplar;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 8 eksemplar atau 100% dari target 8 eksemplar; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 12 eksemplar atau 100% dari target 12 eksemplar.

k) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 4 kegiatan atau 100% dari target 4 kegiatan;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 2 kegiatan atau 100% dari target 2 kegiatan;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 2 kegiatan atau 100% dari target 2 kegiatan; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 15 kegiatan atau 100% dari target 15 kegiatan.
- l) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 34 unit atau 100% dari target 34 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit.
- m) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah surat yang diadministrasikan dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 750 lembar atau 100% dari target 750 lembar;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit.
- n) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian 12 bulan

atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

o) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.

p) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

q) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit.

r) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
 - dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.
- s) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
- dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 13 unit atau 100% dari target 13 unit.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.377.021.965,- dari pagu Rp. 10.569.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan 88,72%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 5.190.021.450,- dari pagu dana Rp. 6.005.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan 86,43% dan capaian indikator

kinerja (K) sebesar 101,90%. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di dukung oleh 1 kegiatan yaitu Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan Output Kegiatan Produktivitas komoditas perkebunan strategis dengan target tahun 2021 18,4 Ton/Ha sedangkan realisasi produktivitas 16,11 Ton/Ha atau capaian kinerja 87,55%. Capaian produktivitas tersebut diperoleh dari produksi komoditas unggulan perkebunan yaitu Kakao, Karet, Kelapa dalam, Kelapa Sawit dan Lada dibagi dengan luas tanaman menghasilkan. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun sub kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	17.136.849,15	17.461.751,15	101,90	Angka sementara Tahun 2021 (Sumber: Dinas Perkebunan)
	• Kelapa Sawit	17.036.402	17.375.224	101,99	
	• Karet	77.763	70.010	90,03	
	• Kakao	3.771	2.180	57,81	
	• Kelapa Dalam	12.479	10.164	81,45	
	• Lada	6.434	4.173	64,86	
	• Pala	0.15	0,15	100	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)	18,4	16,11	87,55	
Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (dokumen)	1	1	100	
	a. Produktivitas	0,75	0,52	69,33	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
	Komoditas Perkebunan (Kakao) (Ton/Ha)				
	b. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet) (Ton/Ha)	1,4	1,32	94,28	
	c. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa) (Ton/Ha)	0,82	0,64	78,04	
	d. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit) (Ton/Ha)	20	17,30	86,50	
	e. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada) (Ton/Ha)	1,18	0,72	61,01	

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan produktivitas komoditi unggulan di atas pada tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Peremajaan Karet 100 Ha dan Intensifikasi Karet 100 Ha

Kegiatan peremajaan karet dilaksanakan di Kabupaten Paser dengan capaian 100 Ha dari target 100 Ha. Sedangkan kegiatan intensifikasi karet tercapai 100 Ha dari target seluas 100 Ha berlokasi di Kabupaten Kutai Timur seluas 20 Ha dan Kabupaten Kutai Barat seluas 80 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel 2.2. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Karet 100 Ha Intensifikasi Karet 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Peremajaan Karet		
	Gapoktan Jaya Abadi	100	Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali Kab. Paser
II	Intensifikasi Karet		
1.	Sidodai II	20	Desa Margomulyo Kec. Rantau Pulung Kab. Kutim
2.	Suka Tani II	30	Kpg. Ombau Asa Kec. Barong Kab. Kutai Barat
3.	Riuq Mua Jadiq	25	Kpg. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
4.	Tunas Karya	25	Kpg. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
Total Bantuan		200	

2) Intensifikasi Kelapa 20 Ha

Kegiatan Intensifikasi Kelapa seluas 20 Ha dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Daftar kelompok tani penerima kegiatan intensifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi Kelapa		
	Bina Bersama	20	Kel. Tanjung Tengah Kec. Penajam Kab. PPU
Total Bantuan		40	

3) Intensifikasi kelapa sawit 100 Ha

Kegiatan Intensifikasi kelapa sawit terealisasi seluas 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha, Kota Samarinda seluas 20 Ha, dan Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 30 Ha. Daftar kelompok tani penerima kegiatan intensifikasi kelapa sawit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Sawit 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi kelapa sawit		
1	Subur Makmur	50	Desa Tanjung Labu. Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutim
2	Pada Elo	20	Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran Kota Samarinda
3	Kutai Mandiri	20	Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kab. Kukar
4	Lada Sari	10	Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar
Total Bantuan		100	

4) Intensifikasi lada 150 Ha dan rehabilitasi lada 50 Ha

Kegiatan intensifikasi lada terealisasi seluas 150 Ha dari target 150 Ha sedangkan rehabilitasi lada terealisasi seluas 50 Ha dari target 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Lada 150 Ha, dan Rehabilitasi Lada 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Intensifikasi lada		
1	Garuda Tani	30	Kampung Biatan Lempake Kec. Biatan Kab. Berau
2	Karya Bersama	25	Kpg. Pesayan Kec. Sambaliung Kab. Berau
3	Embun Pagi	10	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
4	Hijau Daun	20	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
5	KTW. Anisa Sejahtera	5	Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar
6	Karya Insani	0,75	Kel. Sempaja Utara Berambai Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
7	Karya Utama	1	Kel. Sempaja Utara Berambai Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
8	Karya Utama	1,75	Kel. Sempaja Utara BerambaiKec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
9	Karya Abadi	2	Kel. Sempaja Utara BerambaiKec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
10	Tunas Baru	4,5	Kel. Sempaja Utara BerambaiKec. Samarinda Utara, Kota Samarinda
11	Sejahtera Abadi Jaya	50	Kmp. Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau
II	Rehabilitasi Lada		
1	Sri Rejeki A	5	Argomulyo Kab. PPU
2	Sri Rejeki B	14	Argomulyo Kab. PPU
3	Karya Bangun	10	Argomulyo Kab. PPU
4	Karya Muda	5	Argomulyo Kab. PPU
5	Gunung Makmur II	7	Semoi Dua Kab. PPU
6	Tegar	9	Semoi Dua Kec. Sepaku PPU
Total Bantuan		200	

5) Peremajaan Kakao 50 Ha dan Intensifikasi Kakao 150 Ha

Kegiatan Peremajaan kakao terealisasi seluas 50 Ha dan Intensifikasi kakao terealisasi seluas 150 Ha atau terealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 120 Ha, Kabupaten Berau seluas 80 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Kakao 50 Ha dan Intensifikasi Kakao 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Peremajaan kakao		
	Ingin Bersama	50	Desa rantau Sentosa Kec. Busang Kab. Kutim
II	Intensifikasi kakao		
1	Sejahtera	20	Desa Kadugan Jaya Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur
2	Lesau Ame	25	Desa Rantau Sentosa Kec. Busang Kutai Timur
3	Long Ampung	25	Desa Rantau Sentosa Kec. Busang Kutai Timur
4	Makasang Muara	8	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
5	Misa Kada	20	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
6	Tunas Harapan	7	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
7	Anugrah Jemalay	8	Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
8	Berkah Tani Sejahtera	17	Kampung PijanauKec. Gunung Tabur Kab. Berau
9	Gapoktan Mufakat	20	Kpg. Tumbit Dayak Kec.

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
			Sambaliung Kab. Berau
Total Bantuan		200	

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di atas antara lain faktor cuaca, adanya perubahan pemilihan komoditi oleh petani (alih komoditi) serta umur tanaman yang relatif telah memasuki usia tua sehingga produksi dan produktifitas tanaman tidak maksimal. Disamping faktor teknis yang menghambat pelaksanaan kegiatan, pembatalan refofusing anggaran juga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) terealisasi sebesar Rp. 3.323.835.537,- dari pagu sebesar Rp 3.630.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,57% dan untuk capaian indikator kinerja 123,09%. Indikator kinerja program ini Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat 75% dengan realisasi 92,32%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang mendukung yaitu Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman. Dengan output sub kegiatan yakni jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan sejumlah 55.000 benih dengan realisasi 100% atau 55.000 benih, yang terdiri dari:
 - a. Jumlah benih tanaman semusim dan rempah dengan target 20.000 benih dan realisasi 20.000 benih, terdiri dari benih lada 10.000 benih dan pala 10,000 benih
 - b. Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan target 35.000 benih dan realisasi 30.000 benih, terdiri dari kakao 10.000 benih, kelapa 10.000 benih dan kelapa sawit 15.000 benih

Faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan benih perkebunan yaitu faktor cuaca dan ketersediaan prasarana dan sarana perbenihan yang masih kurang. Untuk itu perlu adanya upaya sebagai langkah antisipasi terhadap kendala yang dihadapi. Untuk itu diperlukan adanya upaya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perbenihan seperti jalan, greenhouse, serta perlunya pengembangan kebun induk lada dan sarana pendukungnya.

- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 863.164.978,- atau 92,42% dari pagu Rp. 934.000.000,-. Indikator kinerja pada pada program ini adalah jumlah benih yang beredar. Dengan capaian sebanyak 6.121.600 benih atau 102,03% dari target 6.000.000 benih. Berikut rekapitulasi pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Kalimantan Timur tahun 2021:

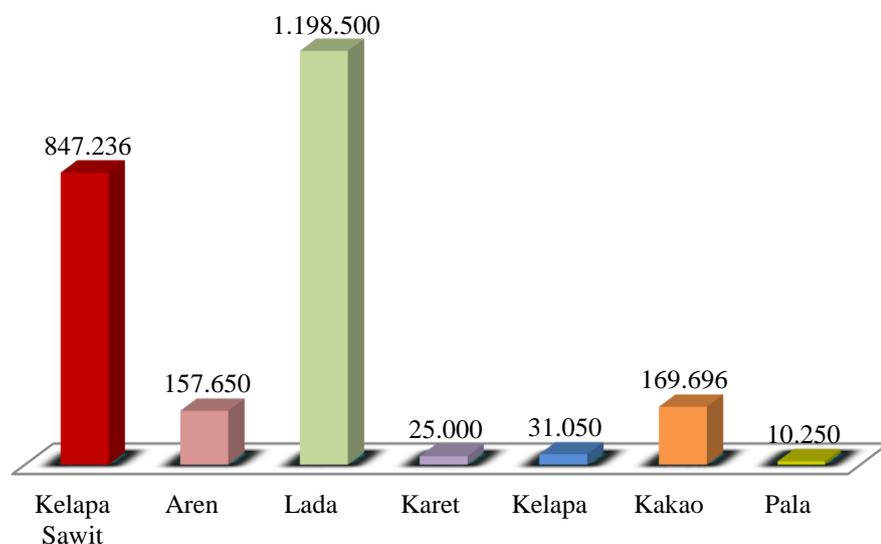
Tabel 2.7. Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Bulan	Kelapa Sawit	Lada	Karet	Aren	Kelapa	Kakao	Pala	Serai Wangi	Jumlah	Benih Illegal	Jumlah Total
1.	Januari	11,276	1,075,000	37,000	28,000	3,000	7,500	10,000		1,171,776	32,500	
2.	Pebruari	126,991				18,000	50,000			194,991		
3.	Maret	2,454			150					2,604		
4.	April	136,293	116,500		51,000					303,793		
5.	Mei	21,308	182,700	100,000			45,000		4,000	353,008		
6.	Juni	49,475			6,000					55,475		
7.	Juli	111,179	212,500				157,500			481,179		
8.	Agustus	564,420	83,000		12,000		10,000	10,000		679,420		
9.	September	274,170				10,000				284,170		
10.	Oktober	371,684								371,684		
11.	November	245,000								245,000	20,000	
12.	Desember	1,926,000								1,926,000		
Jumlah		3,840,250	1,669,700	137,000	97,150	31,000	270,000	20,000	4,000	6,069,100	52,500	6,121,600

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi dengan capaian 6.121.600 benih atau 102,03% dari target 6.000.000 benih. Sedangkan sub kegiatan pada kegiatan ini adalah: pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman, dengan indikator:

a. Jumlah benih yang disertifikasi

Capaian indikator ini adalah 2.343.046 benih atau 78,10% dari target 3.000.000 benih, dengan rincian sebagaimana grafik berikut:



Gambar 2.1. Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan sertifikasi adalah terbatasnya jumlah Pengawas Benih Tanaman (PBT) yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang meliputi 1 (satu) Pengawas benih Tanaman Ahli dan 3 (tiga) Pengawas Benih Tanaman Terampil membawahi 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 Provinsi Kalimantan Utara sehingga pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan maksimal serta tidak tercapainya jumlah

benih yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan oleh pandemi covid 19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kegiatan ini tergantung pada jumlah permohonan masuk.

b. Persentase peredaran benih yang illegitim

Capaian indikator ini adalah 2,51% atau 102,71% dari target 2,58%. Capaian tersebut diperoleh dengan melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran benih di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan dibantu oleh tenaga pengawas benih yang ada di Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam rangka penanganan peredaran benih illegal kelapa sawit. Adapun data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Data Pengawasan Peredaran Benih dan Kasus Benih Illegal

No	Asal/Lokasi	Jenis Komoditi	Jumlah Benih	
			Pengawasan	Kasus benih illegal
1	Desa Girimukti Kab. PPU	Kelapa Sawit	2.500 benih	2.500 benih
2	Desa Putang Kab. Paser	Kelapa Sawit	30.000 batang	30.000 batang
3	Desa Tepian Langsung	Kelapa Sawit	20.000 benih	20.000 benih
4	Kelompok Tani Etam Mandiri Jaya Kec. Muara Jawa	Kelapa Sawit	910 benih	-
5	Kec. Muara Jawa	Kopi	12.000 benih	-
6	Kec. Muara Jawa	Kelapa Dalam	19.325 benih	-
7	CV. Eja Nursery Kab. Kutai Kartanegara	Entres Karet	5.870 pohon	-
8	Kelompok Tani Mega Buana Kab. Kukar	Lada	457.000 stek	-
9	Kelompok Tani Tunas Mekar Kab. Kukar	Lada	65.000 stek	-
10	Kelompok Tani Lada Muda Kab. Kukar	Lada	451.000 stek	-

No	Asal/Lokasi	Jenis Komoditi	Jumlah Benih	
			Pengawasan	Kasus benih ilegal
11	Kab. Bulungan	Lada	221.000 stek	-
12	UPTD PBTP Disbun Kaltim	Kelapa Sawit	25.000 benih	-
		Karet	25.000 benih	-
		Aren	10.000 benih	-

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran dan sertifikasi mutu benih bibit perkebunan pada tahun 2021 ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- a. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan pada sumber benih maupun produsen benih tanaman perkebunan.
- b. Terbatasnya petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang hanya berjumlah sebanyak 4 (empat) orang sedangkan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Kurang aktifnya petugas pengawas benih di Kabupaten/Kota dalam mengawasi sumber benih/produsen benih yang ada di wilayahnya sehingga pengawasan peredaran benih di masing-masing Kabupaten/ Kota tidak maksimal dan ketersediaan benih perkebunan tidak dapat dipantau.
- d. Produsen benih yang telah mempunyai IUPBTP tidak pernah secara rutin melaporkan kegiatan perbenihannya setiap bulan kepada pengawas benih Kabupaten/Kota maupun UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Banyak produsen benih yang tidak menyimpan dokumen penyerta benih dengan baik.

- f. Produsen benih tidak pernah melaporkan pemasangan label benih (pada saat benih diedarkan) kepada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Tidak ada koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman daerah asal benih tanaman perkebunan dari luar wilayah yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur kepada Pengawas Benih Tanaman Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengawasan terhadap dokumen maupun fisik benih tidak maksimal.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.638.333.304,- dari pagu Rp. 10.337.196.000,- (83,37%) dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 6.679.289.750,- dari pagu Rp 7.995.000.000,- atau 83,54%.

Output program ini adalah:

- a. Luas kebun yang dibangun seluas 1.517.300 Ha dari target 1.425.580 Ha atau 106,43%. Rincian luas komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.9. Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No.	Komoditi	Luas (Ha)
1.	Kelapa Sawit	1.359.016
2.	Karet	118.626
3.	Kakao	7.617
4.	Kelapa Sawit	20.018
5.	Lada	8.128

No.	Komoditi	Luas (Ha)
6.	Komoditi Lain	3.895
Total		1.517.300

*) Angka sementara tahun 2021

- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan sebanyak 34 kelompok tani dari target 30 kelompok atau 113,33%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10. Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan

No.	Nama Kelompok Tani	Kab/Kota
	Perluasan Kelapa Sawit	
1.	Barokah	PPU
2.	Bukit Babut	PPU
3.	Alas Panyom Bolum	PPU
4.	Maju Makmur	Kukar
5.	Mekar Sari	Kukar
6.	Maju Terus	Kubar
7.	Bina Warga	Kubar
8.	Utok Ipuh	Paser
	Perluasan Kelapa	
9.	Sumber Rejeki	Paser
	Perluasan Lada	
10.	Balu Mulya	Paser
11.	Usaha Baru	Paser
12.	Harapan Sejahtera	Kukar
13.	KTW. Anisa Sejahtera	Kukar
14.	Harapan Utama	PPU
15.	Karya Usaha	PPU
16.	Al-Ikhlas	PPU
17.	Trubus	PPU
18.	Lestari A	PPU
19.	Sinar Mulya	Kutim
20.	Karya Tani	Kukar
	Perluasan Kakao	
21.	Lembah Subur	Berau
22.	Bukit Harapan	Berau
23.	Mantaruning Jaya	Berau

No.	Nama Kelompok Tani	Kab/Kota
24.	Sukan Lestari	Berau
25.	Apollo	Berau
	Perluasan Karet	
26.	Tujur Betung	Paser
27.	Anugrah	PPU
28.	Guyub Rukun	Kukar
29.	Karya Tani	Kukar
30.	Mekar Baru	Kukar
31.	Mekar Jaya	Kukar
32.	Karya Bersama	Kukar
33.	Sambung Jaya Makmur	Kukar
	Perluasan Pala	
34.	Mitra tani	Berau

Program ini di dukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator jumlah luas kebun yang diperluas. Capaian pada indikator ini 670 Ha atau 100% dari target 670 Ha. Sub Kegiatan pada kegiatan ini adalah Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dimana indikatornya yaitu jumlah luas kebun yang diperluas dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.11. Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2021

Indikator	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
Jumlah luas kebun yang diperluas (Ha)	670	670	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200	200	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20	20	100
Jumlah luas kebun yang	200	200	100

Indikator	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
di perluas (Kelapa Sawit)			
Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50	50	100

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan perluasan kebun 6 komoditi di atas pada tahun 2021 dengan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

1) Perluasan areal kakao seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal kakao tercapai 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 100 Ha dengan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Perluasan kakao		
1	Lembah Subur	30	Kamp. Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan Kab. Berau
2	Bukit Harapan	20	Kamp. Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan Kab. Berau
3	Mantaruning Jaya	20	Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
4	Sukan Lestari	25	Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Berau
5	Apollo	5	Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau
Total Bantuan		100	

2) Perluasan Areal Karet Seluas 200 Ha

Kegiatan perluasan areal karet tercapai 200 Ha dari target 200 Ha,

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Paser seluas 45 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 20 Ha, dan Kabupaten Kutai Kertanegara 135 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Perluasan Karet		
1	Tujur Betung	45	Desa Mungguh Kec. Longkali Kab. Paser
2	Anugrah	20	Kelurahan Gersik Kec. Penajam Kab. PPU
3	Guyub Rukun	25	Desa Perangat Selatan Kab. Kukar
4	Karya Tani	25	Desa Perangat Selatan Kab. Kukar
5	Mekar Baru	20	Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu Kab. Kukar
6	Mekar Jaya	10	Desa Makarti Kec. Marangkayu Kab. Kukar
7	Karya Bersama	15	Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kukar
8	Sambung Jaya Makmur	40	Prangat Baru Kab. Kukar
Total Bantuan		200	

3) Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa tercapai 20 Ha dari target 20 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Paser seluas 20 Ha dan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah :

Tabel 2.14. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
I	Perluasan Areal Kelapa		
	Sumber Rejeki	20	Desa Laburan Baru Kec. Paser Belengkong Kab. Paser
Total bantuan		20	

4) Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 200 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa sawit tercapai 200 Ha dari target 200 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 80 Ha, Kabupaten Paser 40 Ha dan Kutai Kertanegara seluas 80 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 200 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
Perluasan kelapa sawit			
1	Barokah	24	Desa Api-api Kec. Waru Kab. PPU
2	Bukit Babut	26	Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU
3	Alas Panyom Bolum	30	Desa Labangka Kab. PPU
4	Maju Makmur	15	Sari Nadi Kota Bangun Kab. Kukar
5	Mekar Sari	10	Teluk Muda Kec. Kenohan Kab. Kukar
6	Maju Terus	30	Desa Penawai Kec. Bongan Kab. Kubar
7	Bina Warga	25	Desa Penawai Kec. Bongan Kab. Kubar
8	Utok Ipuh	40	Desa Sungai Terik Kec. Batu Sopang Kab. Paser
Total Bantuan		200	

5) Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal lada tercapai seluas 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Paser seluas 40 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 22 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 28 Ha, dan Kabupaten Kutai Timur seluas 10 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
Perluasan lada			
1	Balu Mulya	30	Desa BelimbingKec. Long Ikis Kab. Paser
2	Usaha Baru	10	Desa Selerong Kec. Muara Komam Kab. Paser
3	Harapan Sejahtera	10	Desa Salo Cella Kec. Muara Badak Kab. Kukar
4	KTW. Anisa	5	Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar
5	Sejahtera Harapan Utama	4	Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU
6	Karya Usaha	7	Desa Rintik Kec. Babulu Kab. PPU
7	Al-Ikhlas	6	Desa Bukit Subur Kec. Penajam Kab. PPU
8	Trubus	5	Desa Semoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU
9	Lestari A	6	Desa Semoi Dua Kec. Sepaku Kab. PPU
10	Sinar Mulya	10	Desa Mata Air Kec. Kaubun Kab. Kutim
11	Karya Tani	7	Perangat Selatan Kab. Kukar
Total Bantuan		100	

6) Perluasan Areal Pala Seluas 50 Ha

Kegiatan perluasan areal pala tercapai 50 Ha dari target 50 Ha,

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 50 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah :

Tabel 2.17. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi
	Perluasan Pala		
1	Mitra Tani	50	Desa Teluk Sumbang Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau
	Total Bantuan	50	

Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa faktor penghambat walaupun hal tersebut tidak mempengaruhi capaian target kinerja, namun perlu dilakukan antisipasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan. Faktor penghambat dimaksud antara lain adalah faktor cuaca, keterlambatan pembukaan lahan oleh kelompok tani dan keterlambatan ketersediaan benih di Kalimantan Timur. Upaya sosialisasi kepada kelompok tani maupun penangkar perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari faktor penghambat tersebut.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 1.959.043.554,- atau 83,64% dari pagu sebesar Rp. 2.342.196.000,. Indikator pada program ini adalah jumlah prasarana kantor yang tersedia dengan target 2 unit dan realisasi sebanyak 2 unit atau 100%. Kegiatan pada program ini adalah penataan prasarana pertanian dengan indikator jumlah prasarana pertanian. Indikator kegiatan ini tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit. Sedangkan sub pada kegiatan ini adalah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin

gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya. Indikator pada sub kegiatan ini adalah jumlah bangunan gedung dan laboratorium yang direhab dengan capaian 2 unit atau 100% dari target 2 unit.

4. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.211.933.926,- dari pagu Rp. 2.438.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan 90,72%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Bidang Usaha realisasi keuangan sebesar Rp. 1132.376.875,- atau 92,89% dari pagu dana Rp 1.219.000.000,-. Output program ini adalah Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan capaian sebesar 6,73 Juta Ton CO₂eq atau 164,99% dari target 4,079 Juta Ton CO₂eq . Program ini di dukung oleh Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan output kegiatan :

- a. Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dengan capaian kinerja 100 % atau dengan capaian 128 pelaku usaha dari 128 pelaku usaha yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18. Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
1.	PT. London Sumatera Plantation	Kutai Barat
2.	PT. Citra Palma Pertiwi	Mahulu
3.	PT. Setia Agro Abadi	Mahulu
4.	PT. Gawi Makmur Kalimantan	PPU
5.	PT. Kebun Mandiri Sejahtera	PPU
6.	PT. Sukses Tani Nusasubur	PPU

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
7.	PT. Waru Kaltim Plantation	PPU
8.	PT. Langgeng Muara Makmur	Paser
9.	PT. Muaratoyu Subur Lestari	Paser
10.	PT. Multi Jayantara Abadi	Paser
11.	PT. Nusa Lestari	Paser
12.	PT. Pucuk Jaya	Paser
13.	PT. Saraswanti Sawit Makmur	Paser
14.	PT. Aneka Raksa International	Kutai Barat
15.	PT. Borneo Citra Persada Abadi	Kutai Barat
16.	PT. Borneo Citra Persada Jaya	Kutai Barat
17.	PT. Borneo Citra Persada Mandiri	Kutai Barat
18.	PT. Citra Palma Pertiwi	Kutai Barat
19.	PT. Kalimantan Agro Makmur	Kutai Barat
20.	PT. Ketapang Hijau Lestari	Kutai Barat
21.	PT. Marsam Citra Adiperkasa	Kutai Barat
22.	PT. Agroindo Sukses Sejahtera	Berau
23.	PT. Berau Agro Kusuma	Berau
24.	PT. Berau Sawit Sejahtera	Berau
25.	PT. Gunta Samba Jaya	Berau
26.	PT. Hutan Hijau Mas	Berau
27.	PT. Jabontara Eka Karsa	Berau
28.	PT. Kukar Commodities Worldwide	Berau
29.	PT. Malindomas Perkebunan	Berau
30.	PT. Mulia Inti Perkasa	Berau
31.	PT. Satu Sembilan Delapan	Berau
32.	PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Berau
33.	PT. General Aura Semari	Berau
34.	PT. Tunas Alam Nusantara	Berau
35.	PT. Yudha Wahana Abadi	Berau
36.	PT. Agri Eastborneo Kencana	Berau
37.	PT. Agro Bumi Kaltim	Berau
38.	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Berau
39.	PT. Alam Jaya Perkasa	Berau
40.	PT. Bahtera Bahagia	Berau
41.	PT. Budiduta Agro Makmur	Berau
42.	PT. Cahaya Anugerah Plantation	Berau
43.	PT. Enggang Alam Sawita	Berau
44.	PT. Hamparan Sentosa	Berau
45.	PT. Jaya Mandiri Sukses	Berau
46.	PT. Kota Bangun Sawit Sejahtera	Berau

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
47.	PT. Kutai Agro Jaya	Berau
48.	PT. Maju Kalimantan Hadapan	Berau
49.	PT. Manunggal Adi Jaya	Berau
50.	PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera	Berau
51.	PT. Niagamas Gemilang	Berau
52.	PT. Perkebunan Kaltim Utama I	Berau
53.	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Berau
54.	PT. Rea Kaltim Plantations	Berau
55.	PT. Sasana Yudha Bhakti	Berau
56.	PT. Sawit Golden Prima	Berau
57.	PT. Sawit Kaltim Lestari	Berau
58.	PT. Sawit Prima Sakti	Berau
59.	PT. Sukses Bina Alam	Berau
60.	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Berau
61.	PT. Teguhjaya Prima Abadi	Berau
62.	PT. Tritunggal Sentra Buana	Berau
63.	PT. Tunas Prima Sejahtera	Berau
64.	PT. Anugerah Alam Persada	Kutai Timur
65.	PT. Anugerah Energitama	Kutai Timur
66.	PT. Agro Inti Mandiri	Kutai Timur
67.	PT. Bima Agri Sawit	Kutai Timur
68.	PT. Bina Palma Nugraha	Kutai Timur
69.	PT. Bumi Mas Agro	Kutai Timur
70.	PT. Cipta Davia Mandiri	Kutai Timur
71.	PT. Cipta Narada Lestari	Kutai Timur
72.	PT. Cipta Prima Selaras	Kutai Timur
73.	PT. Dewata Intisawit Nugraha	Kutai Timur
74.	PT. Dewata Sawit Nugraha	Kutai Timur
75.	PT. Dharma Agrotama Nusantara	Kutai Timur
76.	PT. Dinamika Prima Artha	Kutai Timur
77.	PT. Etam Bersama Lestari	Kutai Timur
78.	PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera	Kutai Timur
79.	PT. Fairco Agro Mandiri	Kutai Timur
80.	PT. Gemilang Sejahtera Abadi	Kutai Timur
81.	PT. Gunta Samba	Kutai Timur
82.	PT. Gunta Samba Jaya	Kutai Timur
83.	PT. Hamparan Perkasa Mandiri	Kutai Timur
84.	PT. Hanusentra Agro Lestari	Kutai Timur
85.	PT. Indonesia Plantation Sinergi	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
86.	PT. Karya Prima Agro Sejahtera	Kutai Timur
87.	PT. Karyanusa Ekadaya	Kutai Timur
89.	PT. Kemilau Indah Nusantara	Kutai Timur
90.	PT. Kutai Balian Nauli	Kutai Timur
91.	PT. Kutai Mitra Sejahtera	Kutai Timur
92.	PT. Long Bagun Prima Sawit	Kutai Timur
93.	PT. Multi Pacific International	Kutai Timur
94.	PT. Nala Palma Cadudasa	Kutai Timur
95.	PT. Nusa Indah Kalimantan Plantation	Kutai Timur
96.	PT. Perdana Telen Agromas	Kutai Timur
97.	PT. Prima Cipta Selaras	Kutai Timur
98.	PT. Sawit Sukses Sejahtera	Kutai Timur
99.	PT. Setara Kemilau Mas Adicita	Kutai Timur
100.	PT. Sinergi Agro Industri	Kutai Timur
101.	PT. Sumber Bumi Serasi	Kutai Timur
102.	PT. Swakarsa Sinar Sentosa	Kutai Timur
103.	PT. Subur Abadi Plantation	Kutai Timur
104.	PT. Subur Abadi Wana Agung	Kutai Timur
105.	PT. Sumber Alam Selaras	Kutai Timur
106.	PT. Sumber Kharisma Persada	Kutai Timur
107.	PT. Telen	Kutai Timur
108.	PT. Telen Prima Sawit	Kutai Timur
109.	KTPA Desa Salo Palai	Kutai Kartanegara
110.	KTPA Saliki Dock	Kutai Kartanegara
111.	KTPA Saliki Nilam	Kutai Kartanegara
112.	KTPA Genting Tanah	Kutai Kartanegara
113.	KTPA Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
114.	KTPA Muai	Kutai Kartanegara
115.	KTPA Gotong Royong	Kutai Kartanegara
116.	KTP Nyi'an Kasa Pampang	Samarinda
117.	KTPA Waru	PPU
118.	KTPA Bangun Mulyo	PPU
119.	KTPA Labangka	PPU
120.	KTPA Labangka Barat	PPU
121.	KTPA Desa Tepian Terap	Kutai Timur
122.	KTPA Desa Pelawan	Kutai Timur
123.	KTPA Desa Sange Batu	Paser
124.	KTPA Desa Perepat	Paser
125.	KTPA Desa Sungai Langir	Paser

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
126.	KTPA Desa Lori	Paser
127.	KTPA Desa Laburan	Paser
128.	KTPA Tunas Harapan	Balikpapan

b. Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan dengan realisasi 7 pelaku usaha atau 140% dari 5 pelaku usaha yang menjadi target. Pelaku usaha tersebut antara lain:

1. PT. AE di Kabupaten Kutai Timur;
2. PT. TPS di Kabupaten Kutai Timur;
3. PT. SAWA di Kabupaten Kutai Timur;
4. PT. GSA di Kabupaten Kutai Timur;
5. PT. Jaya Mandiri Sukses di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. PT. Rea Kaltim Plantation di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
7. PT. WKP di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kegiatan di atas terdiri dari 2 sub kegiatan, yakni:

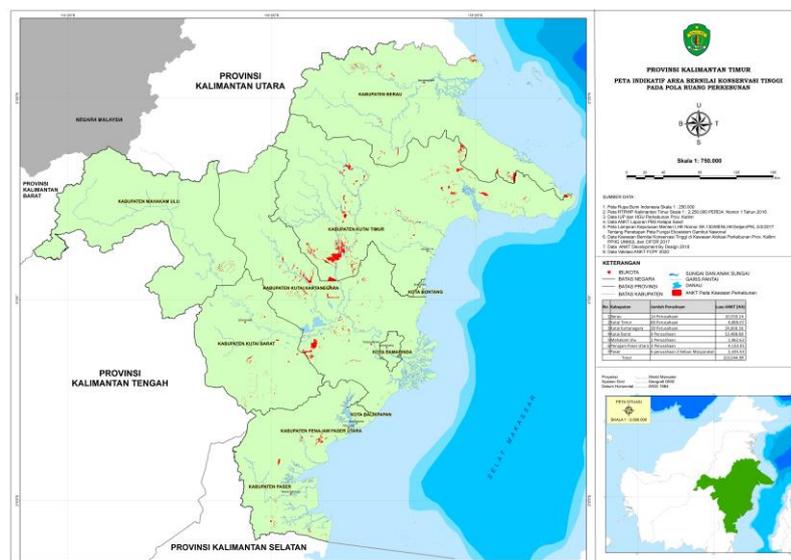
1. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu Rp 632.000.000,- terealisasi sebesar Rp 580.748.200,- (91,89%). Target kinerja pada sub kegiatan ini yaitu:

- a) Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergy 1 PMS dengan capaian 1 PMS (100%) yaitu PT. London Sumatera Plantation di Kabupaten Kutai Barat. Dalam mendukung penanganan dampak perubahan iklim Dinas Perkebunan terus berupaya mendorong Perusahaan Besar Swasta untuk membangun perkebunan dengan melakukan penurunan emisi melalui sosialisasi dan koordinasi ke Perusahaan Besar Swasta yang ada.

- b) Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi dengan capaian 102.038,85 ha atau 100,04% dari target 102.000 Ha. Data luas NKT di areal perkebunan yang dilindungi sebagai berikut:

Tabel 2.19. Luas NKT di Areal Perkebunan yang Dilindungi Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Berau	10.534,39
2.	Kutai Barat	4.805,38
3.	Kutai Kartanegara	24.648,18
4.	Kutai Timur	53.355,71
5.	Mahulu	1.962,28
6.	Paser	4.213,31
7.	PPU	2.519,60
	Total	102.038,85



Gambar 2.2. Areal dengan Nilai Konservasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

2. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

dengan pagu sebesar Rp 587.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 551.628.675,- (93,97%). Target kinerja pada sub kegiatan ini yaitu:

1. Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina terealisasi sebanyak 20 KTPA atau 133,33% dari target 15 KTPA. Keberhasilan pembentukan Kelompok Tani Peduli API (KTPA) dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke kabupaten/kota tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM) serta mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan. Namun ke depan masih terdapat tantangan dalam pembinaan KTPA karena masih terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia KTPA yang tersedia. KTPA yang dibentuk dan dibina pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.20. KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2021

No.	Nama KTPA	Lokasi		
		Desa/ Kampung/ Kel.	Kecamatan	Kab./Kota
1	KTPA Desa Salo Palai	Desa Salo Palai	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
2	KTPA Saliki Dock	Desa Saliki	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
3	KTPA Saliki Nilam	Desa Saliki	Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
4	KTPA Genting Tanah	Desa Genting Tanah	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
5	KTPA Kembang Janggut	Desa Kembang Janggut	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
6	KTPA Muai	Desa Muai	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara
7	KTPA Gotong Royong	Desa Perdana	Kec. Kembang Janggut	Kutai Kartanegara

No.	Nama KTPA	Lokasi		
		Desa/ Kampung/ Kel.	Kecamatan	Kab./Kota
8	KTP Nyi'an Kasa Pampang	Kelurahan Pampang	Kec. Samarinda Utara	Samarinda
9	KTPA Waru	Kel. Waru	Kec. Waru	Penajam Paser Utara
10	KTPA Bangun Mulyo	Kel. Bangun Mulyo	Kec. Waru	Penajam Paser Utara
11	KTPA Labangka	Kel. Labangka	Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
12	KTPA Labangka Barat	Kel. Labangka Barat	Kec. Babulu	Penajam Paser Utara
13	KTPA Desa Tepian Terap	Desa Tepian Terap	Kec. Sangkuliran g	Kutai Timur
14	KTPA Desa Pelawan	Desa Pelawan	Kec. Sangkuliran g	Kutai Timur
15	KTPA Desa Sange Batu	Desa Sange Batu	Kec.Paser Balengkong	Paser
16	KTPA Desa Perepat	Perepat	Kec. Tanah Grogot	Paser
17	KTPA Desa Sungai Langir	Desa Sungai Langir	Kec. Tanah Grogot	Paser
18	KTPA Desa Lori	Desa Lori	Kec. Tanjung Harapan	Paser
19	KTPA Desa Laburan	Desa Laburan	Kec.Paser Balengkong	Paser
20	KTPA Tunas Harapan	Kelurahan Karang Joang	Kec. Balikpapan Utara	Balikpapan

2. Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani terealisasi 7 konflik atau 140% dari target 5 konflik. Keberhasilan penanganan konflik dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota dalam memfasilitasi

kegiatan mediasi konflik (honor & fasilitasi pertemuan mediasi). Di samping itu terdapat pula faktor penghambat kegiatan penanganan konflik yaitu jika salah satu pihak tidak ingin dilakukan mediasi sehingga konflik tidak dapat tertangani dengan baik. Pelaksanaan penanganan konflik tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 2.21. Penanganan Konflik Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Keterangan
1	Kutai Timur	1. PT. AE vs Kelompok Tani Citra Mega Buana dan Kelompok Tani Kudung Permai 2. PT. TPS vs Masyarakat Desa Menamang	Mediasi tgl. 7 April 2021 di Dinas PPR Kutim 1. Mediasi 1 Juli 2021 di Hotel Grand Fatma TGR (Mediasi I) 2. Mediasi 13 Juli 2021 di Disbun Prov Kaltim dan Zoom 3. Mediasi tgl 12 Oktober 2021 di kantor Disbun Ka. Kukar 4. Mediasi tanggal 17 November

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Keterangan
		3. PT. Subur Abadi Wana Agung, PT. Hamparan Perkasa Mandir vs Masyarakat Adat dayat Desa Long Bentuq 4. PT. Gemilang Sejahtera Abadi vs Masyarakat Desa Tanah Abang	2021 di Hotel Harris Mediasi 5 November 2021 di Kantor Gubernur Kaltim, Mediasi DPD RI Mediasi 11 November 2021 di Disbun Kutim
2	Kutai Kertanegara	1. PT. Jaya Mandiri Sukses vs PT. Surya Cipta Mahakam 2. PT. Rea Kaltim vs 3 Kecamatan Janggut, Kec. Tabang dan Kec. Kenohan	Mediasi 18 Maret 2021 di Disbun Prov. Kaltim Mediasi 19 Agustus 2021 di Bappeda Kukar
3	Penajam Pasir Utara	PT. Waru Kaltim Plantations vs Koperasi Waru Sawit Nusantara	Mesiasi 17 Maret 2021 di Distan PPU

- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 1.079.557.051,- atau 88,56% dari pagu sebesar Rp 1.219.000.000,-. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan capaian Rp. 1.044.792.912,- atau 99,78% dari target Rp. 1.047.138.860,-. Dalam pencapaian program ini

didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan indikator luas serangan berat OPT yang dikendalikan, dimana tercapai 220 Ha atau 100% dari target 220 Ha. Data luas serangan berat OPT pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.22. Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Serangan Berat
1	Balikpapan	14 Ha
2	Samarinda	0 Ha
3	Bontang	0 Ha
4	Kutai Kartanegara	0 Ha
5	Kutai Barat	0 Ha
6	Kutai Timur	1 Ha
7	Mahulu	52 Ha
8	Paser	3 Ha
9	Penajam Paser Utara	11 Ha
10	Berau	139 Ha
	Total	220 Ha

Sedangkan sub kegiatan yang mendukung yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan indikator antara lain:

- a) Jenis APH yang dikembangkan dengan target 2 jenis dan realisasi 2 jenis (100%). Jenis APH yang dikembangkan tersebut yaitu *Beauveria Bassiana* dan *Metarhizium anisopliae*.
- b) Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter) dengan target 600 liter dan realisasi 600 liter (100%).

- c) Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga) dengan target 2 lembaga dan realiasi 2 lembaga (100%). Lembaga tersebut yaitu Regu Pengendali OPT (RPO) dan Brigade Proteksi Tanaman (BPT).
- d) Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha) dengan target 220 Ha dan realisasi 220 Ha (100%). Pelaksanaan pengendalian serangan OPT pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.23. Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
1	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	156.83	135.00
2	Kakao	Penggerek Buah Kakao/PBK (Conopomorpha cramerella)	89.83	52.00
3	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (Ganoderma boninense)	7.30	7.00
7	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	142.50	4.00
8	Kelapa Sawit	Busuk tandan marasmius (Marasmius palmivorus)	0.25	3.00
10	Karet	Gugur Daun Karet (Colletotrichum gloesporioidies sp.)	30.50	3.00
11	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	50.00	3.00
9	Karet	Jamur upas (Upasia salmonicolor)	0.50	2.00
14	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	21.90	2.00
16	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (Radopholus similis, Meloidogyne incognita, Fusarium oxyporum, dan Pratylenchus sp.)	1.50	2.00
18	Kelapa Sawit	Apogonia sp.	5.00	1.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
19	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (Ganoderma boninense)	5.00	1.00
20	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	0.63	1.00
21	Lada	Ganggang Pirang	1.00	1.00
22	Kelapa	Kumbang janur (Brontispa sp.)	4.00	1.00
23	Kelapa	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	1.50	1.00
17	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (Radopholus similis, Meloidogyne incognita, Fusarium oxyporum, dan Pratylenchus sp.)	1.50	1.00
26	Kakao	Busuk Buah Kakao (Phytophthora palmivora)	1.00	0.00
27	Kakao	Busuk Buah Kakao (Phytophthora palmivora)	2.00	0.00
28	Kakao	Busuk Buah Kakao (Phytophthora palmivora)	5.00	0.00
5	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	2.50	0.00
29	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	8.70	0.00
30	Karet	Gugur Daun Karet (Colletotrichum gloesporioidies sp.)	5.00	0.00
31	Karet	Gugur Daun Karet (Colletotrichum gloesporioidies sp.)	5.00	0.00
6	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	7.50	0.00
32	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	15.00	0.00
33	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	5.00	0.00
34	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	5.00	0.00
12	Lada	Jamur upas (Upasia salmonicolor)	0.50	0.00
13	Karet	Jamur upas (Upasia	3.00	0.00

No	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan Ringan (Ha)	Luas Serangan Berat (Ha)
		salmonicolor)		
35	Kelapa Sawit	karat daun	0.25	0.00
4	Kelapa	Kera	5.00	0.00
36	Karet	Kering Alur Sadap	150.00	0.00
24	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	10.00	0.00
37	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	0.40	0.00
38	Kelapa Sawit	Landak (<i>Histrix braciura</i>)	4.00	0.00
15	Lada	Penghisap buah lada (<i>Dasynus piperis</i>)	19.00	0.00
39	Lada	Penyakit kuning/ Nematoda (<i>Radopholus similis</i> , <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Fusarium oxyporum</i> , dan <i>Pratylenchus sp.</i>)	2.56	0.00
25	Kelapa Sawit	Tikus (<i>Rattus rattus</i>)	5.00	0.00
40	Kelapa Sawit	Tikus (<i>Rattus rattus</i>)	3.00	0.00
41	Kelapa Sawit	Ulat api (<i>Setora sp./Parasa sp./Darna catenatus/Thosea sp./Hidari irava</i>)	10.00	0.00
42	Kelapa Sawit	Ulat kantong (<i>Mahasena corbetti</i> atau <i>Metisa plana</i>)	70.25	0.00
Total			864.40	220.00

Keberhasilan capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh telah dibentuknya kelembagaan brigade proteksi dan regu pengendali OPT, terkendalinya luas pengendalian OPT, bantuan dari pusat dalam bentuk pestisida nabati 900 liter, serta diselenggarakannya pelatihan pembuatan pestisida nabati dan pelatihan perbanyakkan APH.

5. **Program Perizinan Usaha Pertanian** terealisasi sebesar Rp. 772.764.300,- atau 98,57% dari pagu sebesar Rp. 784.000.000,-. Program ini memiliki indikator jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 41 perusahaan atau 117,14%. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) tahun 2021 sebagai berikut::

Tabel 2.24. Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Perusahaan
1	Kutai Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Sinergi Agro Industri 2. PT. Sinergi Agro Industri (mill) 3. PT. Indonesia Plantation Sinergy 4. PT. Bima Palma Nugraha 5. PT. Bina Agri Sawit 6. PT. tapian Nadenggan 7. PT. Kresna Duta Agroindo 8. PT. Kalimantan Agro Nusantara 9. PT. Telen (Bukit Permata/Mill) 10. PT. Telen (Sei Karang Estate) 11. PT. Telen (Pengadan Estate) 12. PT. Telen Prima Sawit
2	Kutai Kertanegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Sawit Kaltim Lestari 2. PT. Agri East Borneo Kencana 3. PT. Agrojaya Tirta Kencana 4. PT. Maju Kalimantan Hadapan 5. PT. Sawit Prima Sakti 6. PT. Cahaya Anugerah Plantition 7. PT. Prima Mitrajaya mandiri 8. PT. teguh Jayaprima Abadi 9. PT. Jaya Mandiri Sukses 10. PT. Hamparan Sentosa
3	Kutai Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Kaltim Hijau Makmur 2. PT. Borneo Citra Persada Jaya 3. PT. Bumi Agro Lestari 4. PT. Kruing Lestari Jaya
4	Penajam Paser Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Sukses Tani Nusasubur 2. PT. Waru Kaltim Plantation 3. PT. Kebun Mandiri Sejahtera

No	Kabupaten	Perusahaan
		4. PT. Mega Hijau Bersama 5. PT. Alam Permai Makmur Raya 6. PT. Agro Indomas 7. PT. Megah Hijau Lestari 8. PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 9. PT. Triteknik Kalimantan Abadi 10. PT. Dwi Mekar Persada 11. PT. Palma Asia Lestari Mandiri 12. PT. Sagita Agro Kencana
5	Berau	1. PT. Global Primatama Mandiri 2. PT. Satu Sembilan Delapan 3. PT. Jabontara Eka Karsa
Total		41 Perusahaan

Program Perizinan Usaha Pertanian didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan. Capaian indikator tersebut yaitu 89 perusahaan atau 102,30% dari target 87 perusahaan, yang terdiri dari 64 pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tahun 2021 dan 25 pelaku usaha yang dimitrakan dari 2019-2020. Pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel 2.25. Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2021

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
1.	Kutai Timur	1. PT. KPAS 2. PT. AE 3. Kop. Seleq Sejahtera 4. KLP Tani Citra Mega Buana 5. PT. Hanucipta Pratama Buana 6. PT. Telen Prima sawit 7. PT. SAWA 8. PT. Setara Kilau Mas Adicita 9. PT. PT. KAN 10. PT. KDA 11. PT. Tapian Nadenggan

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		12. PT. KBSA
		13. PT. Sabantara Rawi Sentosa
		14. PT. KIN
		15. PT. IPS
		16. PT. Nala Palma Cadudasa
		17. PT. SAP
		18. PT. KCW
		19. PT. TAL
		20. PT. Nadila Indoagro Planttaion
		21. PT. Alhada Agro Sejahtera
		22. PT. Mukti Sejahtera Abadi
		23. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara
		24. KSU Harapan Baru Mitra Usaha PT. Dharma Inti Sawit Nugraha
		25. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Swakarsa Sinar Sentosa
		26. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara
		27. Koperasi Nusantara Udip Tiga Mitra Usaha PT. Nusantara Agro Sentosa
		28. Koperasi Serba Usaha Putra Mitra Usaha PT. Indonesia Plantation Synergi
		29. Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu Mitra Usaha PT. Kresna Duta Agroindo
		30. KSU Karya Mulia Etam Mitra Usaha PT Telen
		31. Koperasi Bumi Baay Persada Mitra Usaha PT Telen
		32. KSU Nyawatan Sawit Lestari (Sei Karang Estate) Mitra Usaha PT Telen
		33. Kop Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit
		34. Koperasi Berkat Telen Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit
		35. Koperasi Rukmana Sari Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit
		36. KSU Bina Abadi Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit
		37. Koperasi Sumber Harum Mitra Usaha

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		PT Telen Prima Sawit 38. KSU Etam Jaya Mandiri I Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 39. Koperasi Titian Bungur Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit 40. KSU Rakyat Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit 41. KSU Pasir Putih Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 42. KSU Karya Maju Bersama (KMB) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri 43. Koperasi Pemuda Sasangka (Fairco II) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri 44. Koperasi Lestari Jaya Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 45. Koperasi Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 46. KSU Benua Baru Mitra Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit
2.	Kutai Kartanegara	47. PT. Niagamas gemilang 48. PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa 49. PT. Hamparan Sentosa 50. PT. Mitra Bangga Utama 51. KPRI Aroma 52. PT. PMM 53. PT. TJA 54. PT. Rea Kaltim Plantations 55. PT. JMS 56. PT. Enggang Alam Sawita 57. Kop. Menamang Membangun 58. Kop. Mou Sejahtera 59. PT. Sukses Bina Alam
3.	Kutai Barat	60. PT. Rimba Raya Tama 61. PT. Harapan Rimba Raya 62. PT. KAL 63. PT. CAK 64. PT. Kruing 65. PT. Farinda Bersaudara 66. PT. BCPM 67. PT. BJPJ 68. Koperasi Sawit Mahang Permai Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		69. Koperasi Tuah Haji Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia 70. Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya Mitra Usaha PT. Farinda Bersaudara 71. Koperasi Sempekat Penawang Lendian Sejahtera Mitra Usaha PT Ketapang Agro Lestari 72. Koperasi Sawit Karya Bersama Lestari Jaya Mitra Usaha PT Kruing Lestari Jaya 73. Koperasi Sawit Sibak Mandiri Mitra Usaha PT Kutai Agro Lestari (CT Agro)
4.	Penajam Paser Utara	74. PT. WKP 75. PT. SBSL 76. PT. Mega Hijau Bersama 77. PT. Mega Hijau Lestari 78. Koperasi One Berkat Solidaritas Mitra Usaha PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 79. Koperasi Sumber Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Kebun Mandiri Sejahtera 80. Koperasi Waru Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Waru Kaltim Plantations
5.	Berau	81. PT. Cahaya Agro Sejahtera 82. PT. Tunas Alam Nusantara
6.	Paser	83. PT. BWS 84. PT. GMK 85. PT. AAMU 86. PT. M3A 87. PT. BMML 88. Koperasi Lengkuhan Jaya Mitra Usaha PT. Pucuk Jaya 89. Koperasi Marinjan Himba Makmur Bolom Mitra Usaha PT Pucuk Jaya

Sub Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan indikator :

1. Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan dengan target sebanyak 35 lembaga pekebun terealisasi sebanyak 35 lembaga

pekebun (100%). Terdapat penambahan 10 lembaga pekebun yang dimitrakan dari tahun 2020. Lembaga pekebun yang dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel 2.26. Lembaga pekebun yang Dimitrakan Tahun 2021

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
1.	Kutai Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 2. KSU Harapan Baru Mitra Usaha PT. Dharma Intisawit Nugraha 3. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT. Swakarsa Sinar Sentosa 4. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera Mitra Usaha PT. Dewata Sawit Nusantara 5. Koperasi Nusantara Udip Tiga Mitra Usaha PT. Nusantara Agro Sentosa 6. Koperasi Serba Usaha Putra Mitra Usaha PT. Indonesia Plantation Synergi 7. Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu Mitra Usaha PT. Kresna Duta Agroindo
2.	Penajam Paser Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi One Berkat Solidaritas Mitra Usaha PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 2. Koperasi Sumber Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Kebun Mandiri Sejahtera 3. Koperasi Waru Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Waru Kaltim Plantations

2. Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina dengan target 52 perusahaan dan realisasi 54 perusahaan (103,85%). Perusahaan yang dibina tersebut antara lain:

Tabel 2.27. Perusahaan yang Dibina Tahun 2021

No.	Kabupaten	Perusahaan
1.	Kutai Timur	1. PT. KPAS 2. PT. AE 3. Kop. Seleq Sejahtera 4. KLP Tani Citra Mega Buana 5. PT. Hanucipta Pratama Buana 6. PT. Telen Prima sawit 7. PT. SAWA 8. PT. Setara Kilau Mas Adicita 9. PT. PT. KAN 10. PT. KDA 11. PT. Tapian Nadenggan 12. PT. KBSA 13. PT. Sabantara Rawi Sentosa 14. PT. KIN 15. PT. IPS 16. PT. Nala Palma Cadudasa 17. PT. SAP 18. PT. KCW 19. PT. TAL 20. PT. Nadila Indoagro Planttaion 21. PT. Alhada Agro Sejahtera 22. PT. Mukti Sejahtera Abadi
2.	Kutai Kartanegara	23. PT. Niagamas gemilang 24. PT. Surya Bumi Tunggal Perkasa 25. PT. Hamparan Sentosa 26. PT. Mitra Bangga Utama 27. KPRI Aroma 28. PT. PMM 29. PT. TJA 30. PT. Rea Kaltim Plantations 31. PT. JMS 32. PT. Enggang Alam Sawita 33. Kop. Menamang Membangun 34. Kop. Mou Sejahtera 35. PT. Sukses Bina Alam

No.	Kabupaten	Perusahaan
3.	Kutai Barat	36. PT. Rimba Raya Tama 37. PT. Harapan Rimba Raya 38. PT. KAL 39. PT. CAK 40. PT. Kruing 41. PT. Farinda Bersaudara 42. PT. BCPM 43. PT. BJPJ
4.	Penajam Paser Utara	44. PT. WKP 45. PT. SBSL 46. PT. Mega Hijau Bersama 47. PT. Mega Hijau Lestari
5.	Berau	48. PT. Cahaya Agro Sejahtera 49. PT. Tunas Alam Nusantara
6.	Paser	50. PT. BWS 51. PT. GMK 52. PT. AAMU 53. PT. M3A 54. PT. BMML

Capaian program, kegiatan maupun sub kegiatan di atas dapat melampaui dari target yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Melakukan modifikasi dan inovasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam situasi COVID 19 dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan;
3. Melakukan pertemuan fasilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perkebunan tentang peraturan dan perundang undangan tentang kemitraan dan kewajiban perusahaan perkebunan;

4. Melakukan koordinasi dengan semua pihak baik di Provinsi Kaltim, Kabupaten/Kota se Kaltim dan Mitra Pembangunan Perkebunan dalam percepatan penyelesaian konflik perkebunan melalui mediasi; dan
5. Melakukan koordinasi kepada Mitra Pembangunan Perkebunan (YKAN dan Wisolve) dalam pelaksanaan Pelatihan SIP Kebun Lanjutan.

Meskipun pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas melampaui target namun masih ditemui permasalahan diantaranya:

1. Pada tahun 2021 masih tingginya kasus COVID 19 sehingga semua pelaksanaan kegiatan terhambat;
 2. Kurangnya Tenaga Penilai Usaha Perkebunan (PUP) yang bersertifikat;
 3. Tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Penilai Usaha Perkebunan (PUP) di Kabupaten;
 4. Belum pahamnya masyarakat pekebun tentang arti kemitraan;
 5. Masih adanya perusahaan perkebunan yang belum menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunannya;
 6. Kurangnya tenaga ahli penilai fisik kebun;
 7. Aplikasi SIP Kebun pada Web Site Disbun yang belum siap dan mengalami gangguan dan perbedaan formn isian dengan kabupaten; dan
 8. Kurangnya tenaga mediator yang bersertifikat baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten se Kalimantan Timur.
6. **Program Penyuluhan Pertanian** terealisasi sebesar Rp. 3.537.377.859,- atau 91,88% dari pagu sebesar Rp. 3.850.000.000,-. Target indikator pada program ini yaitu jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebanyak 1 lembaga (100%). Pada program didukung oleh 3 kegiatan yaitu:
- a) Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah SDM petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 25 orang atau 100% dari target 25 orang. Petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya tersebut antara lain:

Tabel 2.28. Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Samarinda	4 Orang
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Orang
3.	Kabupaten Kutai Timur	7 Orang
4.	Kabupaten Kutai Barata	4 Orang
5.	Kabupaten PPU	2 Orang
6.	Kabupaten Paser	2 Orang
7.	Kabupaten Berau	4 Orang
	Total	25 Orang

b) Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 31 kelompok tani atau 100% dari target 31 kelompok tani.

Tabel 2.29. Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2021

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
1.	Lembah Subur	Kakao	Berau

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
2.	Bukit Harapan	Kakao	Berau
3.	Mantaruning Jaya	Kakao	Berau
4.	Apollo	Kakao	Berau
5.	Sukan Lestari	Kakao	Berau
6.	Guyup Rukun	Karet	Kutai Kartanegara
7.	Mekar Jaya	Karet	Kutai Kartanegara
8.	Karya Jaya	Karet	Kutai Kartanegara
9.	Mekar Baru	Karet	Kutai Kartanegara
10.	Karya Bersama	Karet	Kutai Kartanegara
11.	Sambung Jaya Maju	Karet	Kutai Kartanegara
12.	Maju Makmur	Kelapa Sawit	Kutai Kartanegara
13.	Mekar Sari	Kelapa Sawit	Kutai Kartanegara
14.	KWT Anisa Sejahtera	Lada	Kutai Kartanegara
15.	Harapan Sejahtera	Lada	Kutai Kartanegara
16.	Maju Terus	Kelapa Sawit	Kutai Barat
17.	Bina Marga	Kelapa Sawit	Kutai Barat
18.	Barokah	Kelapa Sawit	Kutai Barat
19.	Alas Panyom Bolum	Kelapa Sawit	Kutai Barat
20.	Bukit Babut	Kelapa Sawit	Kutai Barat
21.	Harapan Utama	Lada	Kutai Barat
22.	Karya Usaha	Lada	Kutai Barat
23.	Al-Ikhlas	Lada	Kutai Barat
24.	Trubus	Lada	Kutai Barat

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
25.	Lestari A	Lada	Kutai Barat
26.	Sumber Rejeki	Kelapa	Paser
27.	Balu Mulya	Lada	Paser
28.	Usaha Baru	Lada	Paser
29.	Tujur Betung	Karet	Paser
30.	Sederhana	Karet	Paser
31.	Mitra Tani	Pala	Berau

2. Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan dengan capaian 1 unit atau 100% dari target 1 unit, yaitu teknologi diverfisikasi kelapa.

c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk dengan capaian 20 lembaga atau 100% dari target 20 lembaga. Lembaga ekonomi pekebun tersebut antara lain:

Tabel 2.30. Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Samarinda	1 Lembaga
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Lembaga
3.	Kabupaten Kutai Timur	5 Lembaga
4.	Kabupaten Kutai Barat	4 Lembaga
5.	Kabupaten PPU	2 Lembaga
6.	Kabupaten Paser	2 Lembaga

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
7.	Kabupaten Berau	4 Lembaga
	Total	20 Lembaga

2. Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI dengan capaian 7 kelompok tani atau 175% dari target 4 kelompok tani. Kelompok tani tersebut antara lain:
- a. Kelompok tani Sido Rukun di Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Kelompok tani Rukun Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Kelompok tani Taka Jaya 2 di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. Kelompok tani Harapan Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartengara;
 - e. Kelompok tani Mekar Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartengara;
 - f. Kelompok tani Lalut Isau Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - g. Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren Kampung belayan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan kegiatan di atas didukung oleh 7 sub kegiatan yaitu:

- a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dengan target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan dan capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun anggaran

sebanyak 1 kegiatan (100%), yaitu kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah I (Fasda) bagi Petugas Teknis Perkebunan/Penyuluh Lapangan yang Membidangi Perkebunan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur.

b) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan target kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah jenis olahan hasil perkebunan dengan capaian sebanyak 18 jenis olahan atau 360% dari target sebanyak 5 jenis olahan yaitu:

a. Produk Pangan sebanyak 17 jenis olahan terdiri dari : Kecap aren, Permen aren, Cheese cookies gula aren, Selai kolang kaling, Mie sagu, Kue lapis sagu, Kue sagu keju, Nata de coco KW, Kue sagon kelapa, Kembang gula kelapa, Minuman coklat Milk 3 in 1, Coklat conventure milk, Coklat compound, Pengolahan lada hijau, Pengolahan lada putih, Minuman jahe lada, dan Acar lada.

b. Produk Non Pangan sebanyak 1 jenis olahan yaitu Pengolahan Bokar

2. Jumlah promosi yang diikuti target 10 event dengan realisasi 15 event atau 150%. Promosi yang diikuti tersebut antara lain:

Tabel 2.31. Promosi yang Diikuti Tahun 2021

No.	Event	Waktu Pelaksanaan
1.	Kaltim fair	15-19 Maret 2021
2.	Pembuatan Video Promosi	25 Mei-30 Juni 2021
3.	Bimtek E-Commerce	6-7 Juli 2021
4.	Pengembangan Informasi pasar (Buletin harga Pasar)	Januari-Desember 2021
5.	Promosi dan Pemasaran	17 April 2021

No.	Event	Waktu Pelaksanaan
	Produk ke Planet Swalayan	
6.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Auto Swalayan	15 April 2021
7.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Yugo Market	6 September 2021
8.	Promosi dan Pemasaran Produk ke Industri Perhotelan	Maret 2021
9.	Kaltim Expo	22-26 September 2021
10.	Workshop Pengolahan dan Pemasaran serta launching Toko Kebun Kaltim	25-27 Oktober 2021
11.	Mou tentang Promosi dan pemasaran Produk Olahan dan Non Olahan Komoditas Perkebunan Kalimantan Timur antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Hotel Four Point By Sheraton Balikpapan	26 Oktober 2021
12.	Espo Kuliner dan Launching Rumah Adat Lamin Anjungan Kaltim di TMII Jakarta	12-15 November 2021
13.	Sosialisasi dan Bimtek Jaminan Halal	17-18 November 2021
14.	Bazaar dan Wisata Kuliner HUT DWP ke-22	28 November-1 Desember 2021
15.	Forum Investasi Kalimantan Timur	7 Desember 2021

- c) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 20 pertemuan atau 100% dari target 20 pertemuan. Pertemuan tersebut antara lain:

Tabel 2.32. Kegiatan Penyuluhan dan pemberdayaan Petani Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan
1.	Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Pertemuan

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan
2.	Kabupaten Kutai Barat	2 Pertemuan
3.	Kabupaten PPU	3 Pertemuan
4.	Kabupaten Paser	5 Pertemuan
5.	Kabupaten Berau	4 Pertemuan
	Total	20 Pertemuan

- d) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 24 lembaga atau 100% dari target 24 lembaga. Terdapat penambahan 4 lembaga dari tahun 2020 sebanyak 20 lembaga. Penambahan 4 lembaga tersebut yaitu:
- Kelompok Tani Anugerah Jemalay di Kabupaten Berau;
 - Kelompok Tani Sumber Ilahi Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - KUD Rangan di Kabupaten Paser; dan
 - KUD Sumber Rejeki di Kabupaten Paser.
- e) Pendampingan Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 9 unit atau 100% dari target 9 unit. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina antara lain:
- MPIG Kampung Belayan dengan komoditi Gula Aren di Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - MPIG Lada Malonan dengan komoditi lada di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan dan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - MPIG Kakao Berau dengan komoditi kakao di Desa Tanjung Redep Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau;

- 4 UPPB Semoga Jaya dengan komoditi karet di Desa Sukaraja Kec. Sepaku Kabupaten PPU;
 - 5 UPPB Jaya Mandiri dengan komoditi karet di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat;
 - 6 UPPB Etam Jaya dengan komoditi karet di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;
 - 7 UPPB Gresik Bangkit dengan Komoditi karet di Kelurahan Gresik Kecamatan Penajam Kabupaten PPU;
 - 8 UPPB Jaya Barokah dengan komoditi karet di Desa Bentuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda; dan
 - 9 UPPB Pampang Jaya dengan komoditi karet di Desa Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- f) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan untuk SNI. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 8 kali atau 133,33% dari target sebanyak 6 kali dengan realisasi 8 kali atau capaian kinerja 133%. Pengujian sampel produk hasil perkebunan tersebut antara lain:
- a. Pengujian Bokar sebanyak 3 kali, dimana sampel tersebut berasal dari kelompok tani Sido Rukun di Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, kelompok tani Rukun Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kelompok tani Taka Jaya 2 di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
 - b. Pengujian mutu biji kakao sebanyak 3 kali, dimana sampel tersebut berasal dari kelompok tani Harapan Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartanegara, kelompok tani Mekar Jaya Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartanegara, kelompok tani Lalut Isau

Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartaengara.

- c. Pengujian aren sebanyak 2 kali dimana sampel tersebut berasal dari kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Aren Kampung belayan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara
- g) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani dengan target kinerja yaitu jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 1 pertemuan atau 100% dari 1 pertemuan, yaitu pertemuan Pelatihan Sekolah Lapang Hama Terpadu (SL-PHT) komoditi Kakao yang diselenggarakan pada bulan April dan Juli di Kabupaten Berau.

Rata-rata pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada rencana kerja dan selama pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami permasalahan yang signifikan. Tabel evaluasi rencana kerja sebagaimana berikut:

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
DINAS PERKEBUNAN					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan	86 %	89%	103,49
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 %	72,63%	103,76
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	10 dokumen	100
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	28 Dokumen	100
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	12 Laporan	100
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	23%	115
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	49 Orang	98
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	5 Unit	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	114 Unit	114 Unit	100
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	4 Unit	100
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	47.240 Lembar	100
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500 eksemplar	1.500 eksemplar	100
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis	100
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	34 Unit	34 Unit	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	100
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	750 Lembar	750 Lembar	100
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	100
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 Unit	21 Unit	100
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	2 Unit	100
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	2 Unit	2 Unit	100
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	17.136.849,15 Ton	17.461.751,15 Ton*)	101,90
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	18,4 Ton/Ha	16,11 Ton/Ha*)	87,55
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	20 Ton/Ha	17,30 Ton/Ha	87
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,4 Ton/Ha	1,32 Ton/Ha	94
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,75 Ton/Ha	0,52 Ton/Ha	69

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,82 Ton/Ha	0,64 Ton/Ha	78
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,18 Ton/Ha	0,72 Ton/Ha	61
		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	30 Kelompok Tani	34 Kelompok Tani	113
		Luas kebun yang dibangun	1.425.580 Ha	1.517.300 Ha*)	106
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	670 Ha	670 ha	100
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	100 Ha	100
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha	200 Ha	100
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	20 Ha	100
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	200 Ha	200 Ha	100
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	100 Ha	100
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	50 Ha	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,079 Juta Ton CO2eq	6,73 Juta Ton CO2eq	165
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK	128 Pelaku Usaha	128 Pelaku Usaha	100
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	100
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	1 PMS	100
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.000 ha	102.038 ha	100
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	21 KTPA	140
		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	7 Konflik	140
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	41 Perusahaan	117
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	87 Perusahaan	89 perusahaan	102
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	35 lembaga pekebun	35 lembaga pekebun	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	54 perusahaan	104
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	1 lembaga	100
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	25 Orang	100
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 Kelompok Tani	31 Kelompok Tani	100
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	5 jenis	18 jenis	360
		Jumlah promosi yang diikuti	10 event	15 event	150
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	20 Pertemuan	100
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	20 Lembaga	100
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 Kelompok tani	8 Kelompok tani	200
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	24 Lembaga	24 Lembaga	100
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	9 Unit	9 unit	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	6 Kali	8 kali	133
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	1 Pertemuan	100
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	86 %	82,39%	96
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 bulan	100
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 bulan	100
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	100%	500
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	18 Orang	17 orang	94
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3 unit	100
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 bulan	100
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	4 unit	100
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12 bulan	100
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 bulan	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	500 Lembar	100
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 Eksemplar	720 Eksemplar	100
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6 jenis	100
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	15 unit	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 jenis	100
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	240 lembar	100
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	4 unit	100
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 jenis	100
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 unit	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	4 unit	100
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	4 unit	100
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PSARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	6.121.600 Benih	102,03
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi	6.000.000 benih	6.121.600 Benih	102,03
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 benih	2.343.046 benih	78
		Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	2,58%	2,51 %	97
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah prasarana kantor yang tersedia	2 Unit	2 unit	100
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian	2 Unit	2 unit	100
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah bangunan gedung dan Laboratorium yang direhab	2 Unit	2 unit	100
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	86 %	84%	98

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 bulan	100
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 bulan	100
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	50%	250
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	6 Orang	75
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3 unit	100
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Unit	75 Unit	100
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	100
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12 bulan	100
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 bulan	100
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	13.100 Lembar	100
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 Eksemplar	8 eksemplar	100
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	9 Jenis	9 Unit	100
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	21 Unit	21 unit	100
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	100
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	395 Lembar	100
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 bulan	100
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 bulan	100
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 jenis	100
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1 unit	100
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1 unit	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	4 unit	100
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	1.047.138.860 Rupiah	1.044.792.912 rupiah	99,78
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	220 Ha	220 Ha	100
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	100
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	0 Kg	0 Kg	-
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	600 Liter	100
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	2 Lembaga	100
		Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	220 Ha	220 Ha	100
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN (PBTP)					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	86 %	87,98%	102
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	20 %	100
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	14 Orang	93
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	100
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	88 Buah	88 Buah	100
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	100
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2.960 Lembar	2.960 Lembar	100
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Eksemplar	12 Eksemplar	100
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	9 Unit	9 Unit	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	100
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	210 Lembar	210 Lembar	100
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1 Unit	100
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 Unit	100
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	13 Unit	100
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	75 %	92,32 %	123,09
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	55.000 Benih	55.000 Benih	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI INDIKATOR KINERJA DESEMBER	CAPAIAN KINERJA (%)
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	20.000 Benih	100
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	10.000 Benih	100
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	10.000 Benih	100
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih	-	-
		Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	35.000 Benih	35.000 Benih	100
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	0 Benih	-	-
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	10.000 Benih	10.000 Benih	100
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih	-	100
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	10.000 Benih	100
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	15.000 Benih	100

Selain evaluasi rencana kerja, kinerja Dinas Perkebunan juga dilihat dari keberhasilan mencapai target yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

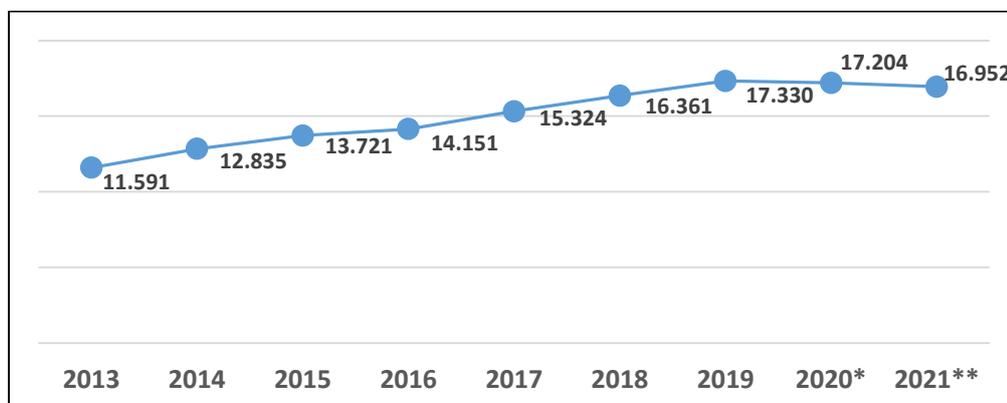
Tabel 2.34. Capaian Indikator Kinerja Utama PD

No.	Sasaran Strategis	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB	Persentase	5,0	4,97	99,40	Sumber: BPS (Angka sangat sementara tahun 2021)
		- Meningkatnya nilai PDRB produk sub sektor perkebunan	Nilai PBRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	19.087	16.952	88,81	Sumber: BPS (Angka sangat sementara tahun 2021)
		- Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Perusahaan	53	62	116,98	(Sumber: Sekretariat Komite ISPO)
		- Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Pekebun	Persentase	108	151,04	139,85	(Sumber: BPS Tahun 2021)
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama							115,22	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama							111,26	

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mencapai 115,22%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) sasaran perangkat daerah. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

- a) Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan pada tahun 2021 mencapai 16.952 Miliar Rupiah (88,81%) dari target 19.087 Miliar Rupiah. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi komoditi perkebunan yakni dari 17,92 jt Ton menjadi 17,46 Juta Ton di tahun 2021 (berdasarkan angka sementara 2021) atau turun 331.041 Ton (-1,86%) dari tahun 2020. Terutama pada komoditi sawit yakni dari 17,72 juta ton TBS menjadi 17,37 juta ton TBS atau turun 346.746 ton TBS (-1,94%) dari tahun 2020.

Selain itu terjadinya pandemi covid-19 sejak tahun 2020 berimbas pada penurunan suply dan demand CPO yang berakibat pula pada penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan ekspor yang menerapkan lockdown. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2021.

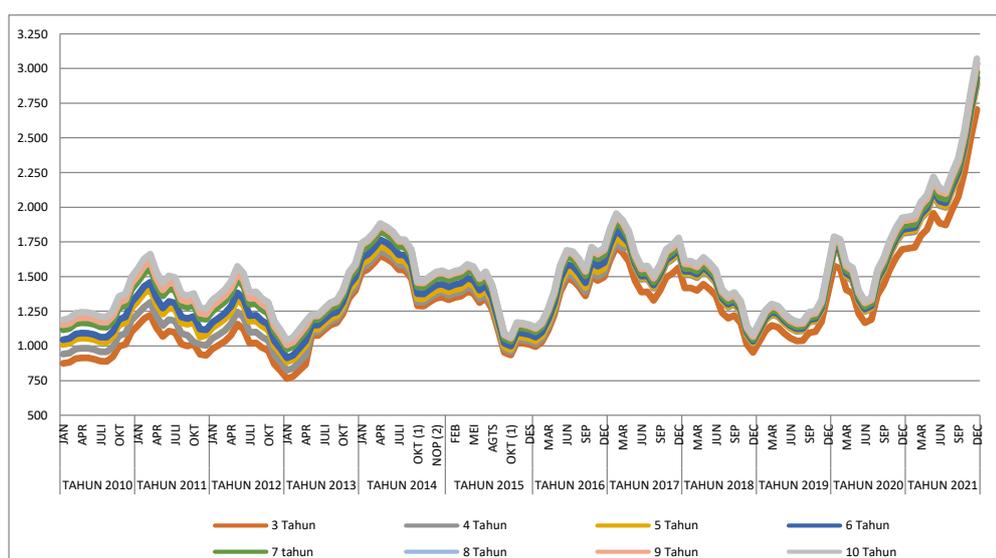


*Data sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

** Data angka sangat sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Gambar 2.3. Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2021

- b) Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 116,98% yakni sebanyak 62 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dengan luas 523.601,39 Ha atau 21,94% dari total IUP tahun 2021 seluas 2.386.496 Ha. Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO".
- c) Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2021 sebesar 151,04 atau mencapai 139,85%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh tingginya harga TBS selama tahun 2021. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dari tahun 2010-Desember 2021:



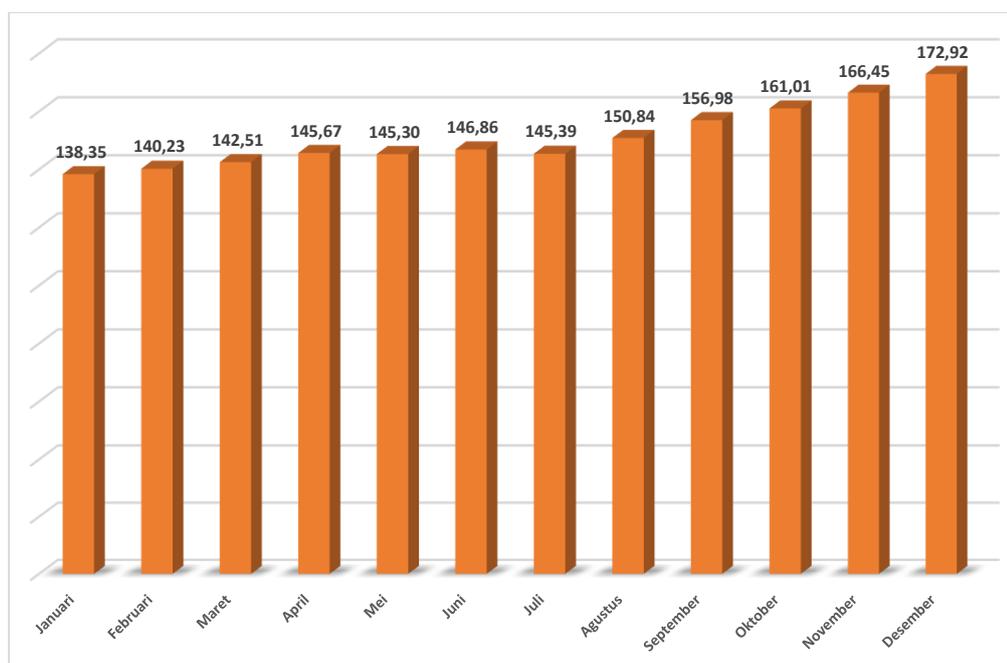
Gambar 2.4. Pergerakan Harga TBS berdasarkan Umur Tanaman hingga Desember 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa harga TBS tahun 2021 merupakan harga tertinggi sejak tahun 2010. Harga TBS kelapa sawit bagi pekebun bermitra bulan Desember 2021 mencapai:



Gambar 2.5. Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra Bulan Desember 2021

Berikut perkembangan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari sampai dengan Desember 2021.



Gambar 2.6. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2021

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 54.524.471.000,- terdiri dari program penunjang sebesar Rp. 26.546.275.000,- dan program pembangunan sebesar Rp. 27.978.196.000,-. Dan melalui mekanisme perubahan APBD 2021 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi tambahan menjadi Rp. 54.578.829.592,- (bertambah Rp. 54.358.592,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 26.600.933.592,- dan program pembangunan sebesar Rp. 27.978.196.000,- dengan total realisasi sebesar 48.375.766.031,- (88,64%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 23.838.334.677,- (89,62%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.537.431.354,- (87,70%) sebagaimana tertera di tabel berikut ini :

Tabel 2.35. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan sumber dana APBD Tahun 2021

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
DINAS+3 UPTD		54,524,471,000	54,578,829,592	48,375,766,031	88.63	
DINAS PERKEBUNAN		42,071,799,396	42,071,799,396	37,116,019,374	88.22	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22,218,799,396	22,218,799,396	19,804,189,140	89.13	Sekretariat
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,305,000,000	1,305,000,000	1,081,418,854	82.87	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	535,000,000	535,000,000	498,975,850	93.27	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	770,000,000	770,000,000	582,443,004	75.64	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,354,114,750	15,354,114,750	13,696,328,984	89.20	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,906,274,750	14,906,274,750	13,380,258,984	89.76	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	447,840,000	447,840,000	316,070,000	70.58	
3.27.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	477,000,000	477,000,000	401,855,600	84.25	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	477,000,000	477,000,000	401,855,600	84.25	
3.27.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1,602,653,674	1,602,653,674	1,441,400,473	89.94	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	9,935,168	9,935,168	9,901,000	99.66	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	100,914,000	100,914,000	98,845,000	97.95	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	364,205,240	364,205,240	240,549,410	66.05	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36,199,266	36,199,266	36,196,525	99.99	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9,600,000	9,600,000	9,600,000	100.00	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,081,800,000	1,081,800,000	1,046,308,538	96.72	
3.27.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	246,349,810	246,349,810	186,275,000	75.61	
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	246,349,810	246,349,810	186,275,000	75.61	
3.27.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2,455,907,362	2,455,907,362	2,231,068,108	90.84	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	494,401,410	494,401,410	292,851,173	59.23	
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	231,903,800	231,903,800	230,645,800	99.46	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,722,102,152	1,722,102,152	1,700,071,135	98.72	
3.27.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	777,773,800	777,773,800	765,842,121	98.47	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	278,612,800	278,612,800	268,952,841	96.53	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407,982,000	407,982,000	406,080,780	99.53	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	91,179,000	91,179,000	90,808,500	99.59	
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	6,005,000,000	6,005,000,000	5,190,021,450	86.43	
<i>3.27.02.1.01</i>	<i>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>	<i>6,005,000,000</i>	<i>6,005,000,000</i>	<i>5,190,021,450</i>	<i>86.43</i>	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	6,005,000,000	6,005,000,000	5,190,021,450	86.43	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,995,000,000	7,995,000,000	6,679,289,750	83.54	
<i>3.27.03.1.01</i>	<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>7,995,000,000</i>	<i>7,995,000,000</i>	<i>6,679,289,750</i>	<i>83.54</i>	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	7,995,000,000	7,995,000,000	6,679,289,750	83.54	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1,219,000,000	1,219,000,000	1,132,376,875	92.89	
<i>3.27.05.1.01</i>	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>1,219,000,000</i>	<i>1,219,000,000</i>	<i>1,132,376,875</i>	<i>92.89</i>	
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	632,000,000	632,000,000	580,748,200	91.89	Bid. Buntan
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	345,000,000	345,000,000	326,993,700	94.78	Bid. Buntan
		242,000,000	242,000,000	224,634,975	92.82	Bid. Usaha
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian	784,000,000	784,000,000	772,764,300	98.57	
<i>3.27.06.1.01</i>	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>784,000,000</i>	<i>784,000,000</i>	<i>772,764,300</i>	<i>98.57</i>	
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan	784,000,000	784,000,000	772,764,300	98.57	Bid. Usaha

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
	izin usaha pertanian					
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	3,850,000,000	3,850,000,000	3,537,377,859	91.88	
3.27.07.1.01	<i>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</i>	277,240,000	277,240,000	249,222,500	89.89	
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	277,240,000	277,240,000	249,222,500	89.89	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.07.1.02	<i>Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian</i>	1,602,615,000	1,602,615,000	1,467,919,605	91.60	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1,068,790,000	1,068,790,000	1,050,211,355	98.26	Bid. PPH
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	533,825,000	533,825,000	417,708,250	78.25	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.07.1.03	<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</i>	1,970,145,000	1,970,145,000	1,820,235,754	92.39	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	552,475,000	552,475,000	466,589,000	84.45	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koorporasi petani	662,793,000	662,793,000	636,210,234	95.99	Bid. PPH
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	518,417,000	518,417,000	509,356,220	98.25	Bid. PPH
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	236,460,000	236,460,000	208,080,300	88.00	Bid. Pengembangan Komoditi
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN		4,862,272,984	4,914,808,436	4,398,982,556	89.50	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1,586,076,984	1,638,612,436	1,576,774,024	96.23	
3.27.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	92,520,000	92,520,000	84,960,000	91.83	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92,520,000	92,520,000	84,960,000	91.83	
3.27.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	162,000,000	162,000,000	158,950,000	98.12	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	162,000,000	162,000,000	158,950,000	98.12	
3.27.01.1.06	<i>Administrasi Umum</i>	181,355,810	181,355,810	180,526,237	99.54	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
	<i>Perangkat Daerah</i>					
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4,569,398	4,569,398	4,564,350	99.89	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	23,266,012	23,266,012	23,132,600	99.43	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	36,492,100	36,492,100	36,437,676	99.85	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,625,500	5,625,500	5,460,500	97.07	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,802,800	2,802,800	2,720,000	97.05	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108,600,000	108,600,000	108,211,111	99.64	
3.27.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>422,740,000</i>	<i>422,740,000</i>	<i>388,658,500</i>	<i>91.94</i>	
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	422,740,000	422,740,000	388,658,500	91.94	
3.27.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>421,940,774</i>	<i>421,940,774</i>	<i>411,433,663</i>	<i>97.51</i>	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.00	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85,504,446	85,504,446	79,766,891	93.29	
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	176,824,200	176,824,200	173,562,200	98.16	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	157,212,128	157,212,128	155,704,572	99.04	
3.27.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>305,520,400</i>	<i>358,055,852</i>	<i>352,245,624</i>	<i>98.38</i>	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	35,910,600	35,910,600	34,929,551	97.27	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252,174,800	304,710,252	299,888,273	98.42	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	17,435,000	17,435,000	17,427,800	99.96	
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	934,000,000	934,000,000	863,164,978	92.42	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
3.27.02.1.02	<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	934,000,000	934,000,000	863,164,978	92.42	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	934,000,000	934,000,000	863,164,978	92.42	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,342,196,000	2,342,196,000	1,959,043,554	83.64	
3.27.03.1.01	<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	2,342,196,000	2,342,196,000	1,959,043,554	83.64	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	2,342,196,000	2,342,196,000	1,959,043,554	83.64	
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN		2,793,657,026	2,795,480,166	2,464,801,080	88.17	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1,574,657,026	1,576,480,166	1,385,244,029	87.87	
3.27.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	94,560,000	94,560,000	84,960,000	89.85	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94,560,000	94,560,000	84,960,000	89.85	
3.27.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	72,000,000	72,000,000	53,060,000	73.69	
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	72,000,000	72,000,000	53,060,000	73.69	
3.27.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	334,077,371	334,077,371	286,824,494	85.86	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	9,975,896	9,975,896	6,127,779	61.43	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	13,200,000	13,200,000	10,576,650	80.13	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	77,875,400	77,875,400	45,432,290	58.34	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23,420,475	23,420,475	22,548,400	96.28	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,605,600	5,605,600	5,600,000	99.90	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	204,000,000	204,000,000	196,539,375	96.34	
3.27.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	223,985,000	223,985,000	214,303,000	95.68	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	223,985,000	223,985,000	214,303,000	95.68	
3.27.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	522,124,655	523,947,795	444,846,748	84.90	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5,850,000	5,850,000	5,850,000	100.00	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	210,882,127	212,705,267	134,733,001	63.34	
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	148,180,400	148,180,400	147,210,950	99.35	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	157,212,128	157,212,128	157,052,797	99.90	
3.27.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	327,910,000	327,910,000	301,249,787	91.87	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	35,210,000	35,210,000	33,546,612	95.28	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	261,000,000	261,000,000	252,851,075	96.88	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	31,700,000	31,700,000	14,852,100	46.85	
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1,219,000,000	1,219,000,000	1,079,557,051	88.56	
3.27.05.1.01	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	1,219,000,000	1,219,000,000	1,079,557,051	88.56	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1,219,000,000	1,219,000,000	1,079,557,051	88.56	
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN		4,796,741,594	4,796,741,594	4,395,963,021	91.64	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1,166,741,594	1,166,741,594	1,072,127,484	91.89	
3.27.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	92,520,000	92,520,000	84,080,000	90.88	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92,520,000	92,520,000	84,080,000	90.88	
3.27.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	135,000,000	135,000,000	131,167,087	97.16	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	135,000,000	135,000,000	131,167,087	97.16	
3.27.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	334,799,318	334,799,318	319,943,801	95.56	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	6,014,618	6,014,618	6,001,700	99.79	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	825,000	825,000	824,900	99.99	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	64,187,200	64,187,200	49,607,575	77.29	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,452,500	4,452,500	4,452,500	100.00	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100.00	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	257,400,000	257,400,000	257,137,126	99.90	
3.27.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	29,780,000	29,780,000	25,605,000	85.98	
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	29,780,000	29,780,000	25,605,000	85.98	
3.27.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	441,337,276	441,337,276	379,264,850	85.94	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.00	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	113,473,916	113,473,916	55,274,824	48.71	
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	129,248,200	129,248,200	127,780,560	98.86	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	196,515,160	196,515,160	194,109,466	98.78	
3.27.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	133,305,000	133,305,000	132,066,746	99.07	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	36,510,000	36,510,000	35,275,668	96.62	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58,520,000	58,520,000	58,516,078	99.99	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	38,275,000	38,275,000	38,275,000	100.00	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Penanggung Jawab
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	3,630,000,000	3,630,000,000	3,323,835,537	91.57	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3,630,000,000	3,630,000,000	3,323,835,537	91.57	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	3,630,000,000	3,630,000,000	3,323,835,537	91.57	

4. Perencanaan Pembangunan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Adapun tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah **“Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan”**.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Timur periode 2019-2023 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan**, dengan indikator :
 - Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)
2. **Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan**, dengan indikator :
 - Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) (Perusahaan)
3. **Meningkatnya kesejahteraan pekebun**, dengan indikator :
 - NTP perkebunan rakyat (%)

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pencapaian kinerja setiap instansi. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Tanah, Bangunan dan Gedung, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Pengairan, serta sarana dan prasarana lainnya. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam Buku Inventaris Barang dan dalam neraca Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sarana dan prasarana termasuk dalam kategori aset tetap.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan di wilayah Kalimantan Timur tahun 2021 mengalami berbagai kendala, hambatan dan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan;
- b. Rendahnya produktivitas kebun rakyat;

- c. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal;
- d. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan;
- e. Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan;
- f. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah;
- g. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan;
- h. Terdampaknya usaha perkebunan akibat Covid-19; dan
- i. Belum siapnya industri hilir untuk mendukung ketersediaan pangan dan energi hijau untuk IKN.

Upaya Penyelesaian Masalah

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tindakan penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
- b) Peningkatan produktivitas kebun khususnya kebun swadaya;
- c) Meningkatkan upaya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan penguatan kelembagaan pekebun yang baik;
- d) Menerapkan prinsip pembangunan perkebunan secara berkelanjutan di Kalimantan Timur;
- e) Memperbaiki sistem pengelolaan data perkebunan dan diseminasinya;
- f) Membuka jalur pemasaran komoditas perkebunan hingga ke tingkat internasional;
- g) Melakukan diversifikasi pengembangan komoditas perkebunan;
- h) Pemenuhan pangan dan energi untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara;
- i) Penggerak dan pemulih ekonomi kerakyatan melalui usaha perkebunan di masa pandemi Covid-19; dan
- j) Percepatan pelaksanaan pembangunan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima

A. Satuan Kerja 05

A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

A.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

A.3. Program dan Kegiatan

Adapun program Satuan Kerja 05 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penguatan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - c. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

A.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 05 Tahun 2021

KODE	URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN	OUTPUT			
		TARGET		REALISASI	
		VOL	SATUAN	VOL	SATUAN
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
018.05.EC 1779 1779.CAG 018.05.WA 1780	Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri (DK) Dukungan Perlindungan Perkebunan Perangkat Perlindungan Perkebunan Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	2 1	UNIT LAYANAN	2 1	UNIT LAYANAN
018.05.EC 1779 1779.RAI 5889 5889.AEA 5889.PDA 5889.RAG 5889.RBK 5890 5890.ABR 5890.AEA 5890 RAI 1780 1780.EAB	Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri (TP) Penguatan Perlindungan Perkebunan Sarana Pengembangan Kawasan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran Hasil Perkebunan Koordinasi Standarisasi Produk Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Perkebunan Koordinasi Sarana Pengembangan Kawasan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	50 3 800 2 1 4 2 63 1	UNIT KEGIATAN PRODUK UNIT UNIT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEGIATAN UNIT LAYANAN	50 1 800 2 1 1 2 63 1	UNIT KEGIATAN PRODUK UNIT UNIT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEGIATAN UNIT LAYANAN

A.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan

Sumber dana Satuan Kerja 05 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : SP DIPA-018.05.3.169066/2021 dan SP DIPA-018.05.4.169114/2021

tanggal 23 November 2020. Adapun jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 05 Tahun 2021

KODE	URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
018.05	DK + TP	2.473.404.000	2.431.503.540	98,30
	Dekonsentrasi (DK)	509.988.000	506.163.100	98,66
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (DK)	157.500.000	155.386.200	98,66
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	157.500.000	155.386.200	98,66
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lindungan Hidup	157.500.000	155.386.200	98,66
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Lapangan (LL)	157.500.000	155.386.200	98,66
051	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)	29.300.000	27.607.200	94,22
A	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)	29.300.000	27.607.200	94,22
053	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT	57.100.000	56.985.000	99,80
A	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT 21 Orang	57.100.000	56.985.000	99,80
054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	71.100.000	70.794.000	99,57
A	Operasional Brigade Proteksi Tanaman (PBT)	54.000.000	53.714.500	99,47
B.	Operasional RPO	17.100.000	17.079.500	99,88
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	352.488.000	350.776.900	99,51
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	352.488.000	350.776.900	99,51
1780.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	352.488.000	350.776.900	99,51
1780.EAB.007.	Layanan Manajemen Satker	352.488.000	350.776.900	99,51
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	36.200.000	35.537.500	98,17
A	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	36.200.000	35.537.500	98,17
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	214.698.000	213.970.400	99,66
A	Insentif Mantri Statistik Perkebunan 95 Orang	128.250.000	128.250.000	100,00
B	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	22.958.000	22.956.900	100,00
C	Data Informasi dan Statistik	63.490.000	62.763.500	98,86
053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	101.590.000	101.269.000	99,68
A	Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi	24.500.000	24.284.000	99,12
B	Pemantapan Sistem Akuntansi, Verifikasi Pelaksanaan Anggaran dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	18.350.000	18.350.000	100,00
C	Inventarisasi dan Pengendalian Sisa Kredit Sertifikat Petani Eks proyek UPP	40.690.000	40.690.000	100,00
D	Penyelesaian Permasalahan Asset BMN	18.050.000	17.945.000	99,42
	Tugas Pembantuan (TP)	1.963.416.000	1.925.340.440	98,06

KODE	URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
018.05.08.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.645.306.000	1.615.303.790	98,18
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	172.500.000	171.869.100	98,18
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	172.500.000	171.869.100	98,18
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	172.500.000	171.869.100	98,18
053	<i>Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun</i>	<i>172.500.000</i>	<i>171.869.100</i>	<i>98,18</i>
A	Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Provinsi Kalimantan Timur 50 Ha	172.500.000	171.869.100	98,18
5889	Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	930.800.000	920.625.040	98,91
5889.AEA	Koordinasi	236.850.000	234.628.340	99,06
5889.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	236.850.000	234.628.340	99,06
054	<i>Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga TBS</i>	<i>57.600.000</i>	<i>57.275.900</i>	<i>99,44</i>
A	Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga TBS 1 Keg	57.600.000	57.275.900	99,44
055	<i>Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan</i>	<i>54.300.000</i>	<i>53.842.600</i>	<i>99,16</i>
A	Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan	54.300.000	53.842.600	99,16
057	Koordinasi Pelaksanaan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	124.950.000	123.509.840	98,85
A	Pendampingan, Pengawasan, Monev dan Pemutakhiran Data Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	124.950.000	123.509.840	98,85
5889.PDA	Standarisasi Produk	454.300.000	452.701.400	99,65
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	454.300.000	452.701.400	99,65
051	<i>Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat</i>	<i>454.300.000</i>	<i>452.701.400</i>	<i>99,65</i>
A	Pelaksanaan Penerbitan STDB Pekebun Sawit di Kab. Kutai Timur 200 STDB	101.300.000	101.300.000	100,00
B	Pelaksanaan Penerbitan STDB Pekebun Sawit di Kab. Paser 400 STDB	201.500.000	201.485.000	99,99
C	Pelaksanaan Penerbitan STDB Pekebun Sawit di Provinsi	51.300.000	49.716.400	96,91
D	Pelaksanaan Penerbitan STDB Pekebun Sawit di Kab. Kutai Kartanegara 200 STDB	100.200.000	100.200.000	100,00
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	214.750.000	209.115.300	97,38
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	214.750.000	209.115.300	97,38
051	<i>Penyediaan Sarana Pengolahan Komoditas Perkebunan</i>	<i>214.750.000</i>	<i>209.115.300</i>	<i>97,38</i>

KODE	URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
A	Sarana Fasilitas Pengolahan Karet 2 Unit di Kab. Kutai Kartanegara	214.750.000	209.115.300	97,38
5889.RAG	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.900.000	24.180.000	97,11
5889.RAG.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	24.900.000	24.180.000	97,11
051	<i>Penyediaan Prasarana Pengolahan Komoditas Perkebunan</i>	<i>24.900.000</i>	<i>24.180.000</i>	<i>97,11</i>
A	Penyediaan Prasarana Bangunan UPH Karet di Kab. Kutai Kartanegara 2 Unit	10.000.000	9.900.000	99,00
B	Pendampingan dan Pengawasan Prasarana Pengolahan Karet di Kab. Kutai Kartanegara	14.900.000	14.280.000	95,84
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	542.006.000	522.809.650	96,46
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	117.201.000	116.100.000	99,06
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	117.201.000	116.100.000	99,06
052	<i>Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan</i>	<i>84.966.000</i>	<i>83.935.000</i>	<i>98,79</i>
A	Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan 3 Rekom	84.966.000	83.935.000	98,79
053	<i>Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan</i>	<i>32.235.000</i>	<i>32.165.000</i>	<i>99,78</i>
A	Fasilitas Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan 1 Rekom	32.235.000	32.165.000	99,78
5890.AEA	Koordinasi	144.830.000	136.755.000	94,42
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	144.830.000	136.755.000	94,42
051	<i>Evaluasi kelayakan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan</i>	<i>29.000.000</i>	<i>28.918.000</i>	<i>99,72</i>
A	Evaluasi Kelayakan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1 Kegiatan	29.000.000	28.918.000	99,72
054	<i>Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Pengawasan Benih di Provinsi 1 Kegiatan</i>	<i>115.830.000</i>	<i>107.837.000</i>	<i>93,10</i>
A	Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Pengawasan Benih di Provinsi 1 Kegiatan	115.830.000	107.837.000	93,10
5890.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	279.975.000	269.954.650	96,42
5890.RAI.001	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	279.975.000	269.954.650	96,42
052	<i>Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam</i>	<i>80.083.000</i>	<i>76.066.000</i>	<i>94,98</i>
A	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun 2 di Kab. Kutai Barat 1 Ha	29.657.000	28.025.000	94,50
B	Pemeliharaan Kebun Induk tanaman lada Tahun 3 di Kab. Kutai Barat 1 Ha	3.620.000	3.620.000	100,00
C	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun 2 Kab. Kutai Kartanegara 1 Ha	2.660.000	2.660.000	100,00

KODE	URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
D	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun 3 Kab. Kutai Kartanegara 1 Ha	2.660.000	2.660.000	100,00
E	Pemeliharaan kebun Induk Tanaman Lada Tahun 2 di Kab Kutai Timur 2 Ha	6.500.000	6.500.000	100,00
F	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Aren Tahun 6 di Kab. Kutai Timur 5 Ha	34.986.000	32.601.000	93,18
053	<i>Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lokal</i>	<i>15.230.000</i>	<i>12.365.000</i>	<i>81,19</i>
A	Pemeliharaan BPT dan PIT Lada yang telah ditetapkan di Kab. Kutai Kartanegara	15.230.000	12.365.000	83,83
054	<i>Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul</i>	<i>184.662.000</i>	<i>181.523.650</i>	<i>98,30</i>
A	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lada di Kab. Kutai Kartanegara 5 Ha	80.883.000	78.996.490	97,67
B	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Aren di Kab. Kutai Timur 50 Ha	102.779.000	102.527.160	98,79
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	318.110.000	310.036.650	97,46
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjenbun	318.110.000	310.036.650	97,46
1780.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	318.110.000	310.036.650	97,46
1780.EAB.007	Layanan Manajemen Satker Daerah	318.110.000	310.036.650	97,46
052	<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</i>	<i>209.450.000</i>	<i>201.641.650</i>	<i>96,27</i>
A	Operasional Petugas pendamping THL-PP S1 dan SLTA (TKP/PLP-TKP) 13 Orang	209.450.000	201.641.650	96,27
053	<i>Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan</i>	<i>108.660.000</i>	<i>108.395.000</i>	<i>99,76</i>
A	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	108.660.000	108.395.000	99,76

A.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas di Satuan Kerja 05 berjumlah 17 (Tujuh Belas) orang, berdasarkan :

- a. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/02/ I-BPKAD/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;

- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/01/ I-BPKAD/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;
- c. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/004/Kpts-Disbun/2021 tanggal 4 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Negara Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2021;
- d. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/027/Kpts-Disbun/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Provinsi Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2021;
- e. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/028/Kpts-Disbun/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2021; dan
- f. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/029/Kpts-Disbun/2021 tanggal 6

Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Perkebunan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Gender	Pendidikan			Pangkat		
	S2	S1	SMA	IV	III	II
Pria	3	4	0	2	4	1
Wanita	0	8	2	0	4	6
Jumlah	3	12	2	2	8	7

A.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yakni adanya refocusing anggaran sebanyak 4 kali akibat pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan khususnya pada kegiatan mengalami keterlambatan dan terealisasi menjelang akhir tahun anggaran. Solusi yang diambil dengan adanya permasalahan tersebut yakni pada pelaksanaan tahun 2022, akan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama antar daerah dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Daerah yang diajak kerjasama :

Adapun daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

b. Dasar hukum :

Dasar hukum dari pelaksanaan kerjasama ini adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2003 tentang Perkebunan yang Berkelanjutan; dan
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

c. Bidang Kerjasama :

Adapun kerjasama yang dilaksanakan dalam bidang Pembangunan Kebun Rakyat

d. Nama Kegiatan :

Adapun nama kegiatannya adalah Kerjasama Pembangunan Kebun Rakyat

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan bersama sesuai kebutuhan yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

f. Jangka Waktu Kerjasama :

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani (1 November 2018), dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

g. Hasil (Output) dari Kerjasama :

Adapun hasil kerjasama yang diharapkan sebagai berikut :

- Merencanakan dan melaksanakan pengiriman/mendatangkan bibit karet Okulasi Mata Tidur (OMT) dan biji karet bermutu tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Kalimantan Timur. Guna mencapai peningkatan, pendapatan petani yang keberlanjutan pada usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
- Memfasilitasi perdagangan Bokar (Bahan Olah Karet) antara Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Guna mencapai peningkatan pemasaran bokar dan berdaya saing yang berkelanjutan usaha perkebunan rakyat
- Merencanakan dan melaksanakan pengiriman bahan bibit lada varietas malonan 1 (unggul nasional) dan aren genjah asal Kalimantan Timur ke Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mencapai tujuan diversifikasi kebun rakyat guna meningkatkan pendapatan yang keberlanjutan pada usaha perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan

h. Permasalahan dan Solusi : -

i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan : -

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan mitra pembangunan :

a. Mitra yang diajak kerjasama :

Adapun mitra yang diajak kerjasama adalah Impartial Mediator Network (IMN)

b. Dasar hukum :

Dasar hukum dari pelaksanaan kerjasama ini adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan;
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; dan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

c. Bidang Kerjasama :

Adapun kerjasama yang dilaksanakan dalam hal Penanganan Konflik di Bidang Perkebunan

d. Nama Kegiatan :

Adapun nama kegiatannya adalah Kerjasama Penanganan Konflik di Bidang Perkebunan

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur oleh para pihak berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan aturan keuangan para pihak

f. Jangka Waktu Kerjasama :

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani (13 Maret 2018), dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

g. Hasil (Output) dari Kerjasama :

Adapun hasil kerjasama yang diharapkan sebagai berikut :

- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan resolusi konflik melalui pelatihan mediasi untuk penanganan konflik perkebunan bagi Petugas Provinsi/Kabupaten
- Pendampingan dan asistensi penanganan konflik perkebunan secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan konflik di lapangan
- Pengembangan kebijakan dan panduan-panduan penanganan konflik perkebunan

h. Permasalahan dan Solusi : -

i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan : -

3. Kerjasama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan mitra pembangunan :

I. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

a. Kabupaten yang diajak kerjasama:

Adapun Kabupaten yang bekerja sama adalah Kabupaten Kutai Timur

b. Mitra yang diajak kerjasama :

Adapun mitra yang diajak kerjasama adalah Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

c. Dasar hukum :

Dasar hukum dari pelaksanaan kerjasama ini adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan;
- Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur;
- *Aide Memore to the Indonesian-German Government to Government (G2G) Consultations on Development Cooperation held in Jakarta on 28 January 2019;*
- Surat Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas kepada GIZ yang menyatakan persetujuan untuk bekerja sama dalam kerangka proyek *Sustainable and Climate-Friendly Palm Oil Production and Procurement (SCPOPP)* tertanggal 10 Juli 2019;
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Nomor:119/5623/B.Humas/2019) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Nomor:525/62/MoU/HK/IX/2019) dengan *Deutsche Gesselsharft Fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* (Nomor:001/SCPOPP-AGGR/IX/2019) tentang Pelaksanaan

Kerjasama Mendukung Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur tertanggal 18 September 2019.

d. Objek Kerjasama :

Objek kerjasama ini adalah berupa peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Desa, dan Koperasi petani sawit rakyat terpilih untuk dapat mengelola penggunaan lahan dan kebun sawit secara berkelanjutan

e. Nama Kegiatan :

Adapun nama kegiatannya adalah Kerjasama Mendukung Perkebunan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur

f. Sumber Pembiayaan :

Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur oleh para pihak berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan aturan keuangan para pihak

g. Jangka Waktu Kerjasama :

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani (18 September 2019), dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

h. Hasil (Output) dari Kerjasama :

Adapun hasil kerjasama yang diharapkan sebagai berikut :

- Terwujudnya pembangunan perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

i. Permasalahan dan Solusi : -

j. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan : -

II. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

a. Kabupaten yang diajak kerjasama:

Adapun Kabupaten yang bekerja sama adalah Kabupaten Berau

b. Mitra yang diajak kerjasama :

Adapun mitra yang diajak kerjasama adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

c. Dasar hukum :

Dasar hukum dari pelaksanaan kerjasama ini adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan;
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemebntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820;
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
 - Perjanjian antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerja sama Teknis dalam Konteks *International Climate Initiative* tahun 2011 bertanggal 10 Mei 2017;
 - Perjanjian Pelaksanaan untuk Proyek Kerjasama Teknis antara GIZ dan Beppenas tentang proyek "Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur" bertanggal 25 Februari 2019;
 - Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Nomor: 197/15/MoU/BKPW/2019 dan Nomor: 024/DOC/YKAN/XA/X/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan, tertanggal 16 Oktober 2019; dan
 - Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Nomor: 119/6170/B.HUMAS/2019 dan Nomor:027/DOC/YKAN/XA/X/19 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 18 Oktober 2019.
- d. Objek Kerjasama :
- Objek kerjasama ini adalah program kegiatan guna mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timjur dan Kabupaten Berau dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah dan berkelanjutan sebagai bagian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Nama Kegiatan :
- Adapun nama kegiatannya adalah Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi dan

Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur (*Low-Emissions Oil Palm Development (Leopald) in East Kalimantan*)

f. Sumber Pembiayaan :

Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur oleh para pihak berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan aturan keuangan para pihak

g. Jangka Waktu Kerjasama :

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani (17 Juni 2020-15 Februari 2022), dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

h. Hasil (Output) dari Kerjasama :

Adapun hasil kerjasama yang diharapkan sebagai berikut :

- Rencana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang didukung oleh pemangku kepentingan, dimana rencana tersebut memuat informasi data spasial dalam menentukan area yang sesuai untuk pengembangan kebun sawit dan model kelembagaan (“Rencana Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan”);
- Sistem perizinan perkebunan kelapa sawit yang menjamin pemberi izin hanya pada lahan yang sesuai berdasarkan Rencana Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- Pengembangan sistem penguatan pengelolaan data/informasi terkait program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi dan Berkelanjutan di Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur;
- Lima kampung memiliki rencana tata guna lahan dan pembangunan kampung sebagai dasar perjanjian kemitraan secara tertulis dengan perusahaan kebun sawit di Kabupaten Berau;

- Beroperasinya Sekretariat Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupatej Berau; dan
- Adanya regulasi daerah untuk mendukung perkebunan kelapa sawit rendah emisi dan berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi.

i. Permasalahan dan Solusi : -

j. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan : -

III. Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia

a. Kabupaten yang diajak kerjasama:

Adapun Kabupaten yang bekerja sama adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Pasert Utara dan Kabupaten Berau

b. Mitra yang diajak kerjasama :

Adapun mitra yang diajak kerjasama adalah Yayasan Solidaridad Network Indonesia

c. Dasar hukum :

Dasar hukum dari pelaksanaan kerjasama ini adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan;
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemebntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820;
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Niaga dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit;
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia Nomor: 119/B.HUMAS/2019 dan Nomor: 10/PJ/KT-PROV/YSNI/2019 tentang

Kemitraan Strategis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur, tertanggal 20 Juni 2019;

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia Nomor: 119/436 /PEM.3 /2019 dan Nomor 09/Pj/KT-PSR/YSNI/2019 tentang Kemitraan Strategis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Paser, tertanggal 19 Juni 2019;
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Berau dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia Nomor: 197/17/MoU/BKPW/2019 dan Nomor: 14/Pj/KT-BRU/YSNI/2019 tentang Kemitraan Strategis dalam Mewujudkan Pembangunan Hijau dan Berkelanjutan di Kabupaten Berau, tertanggal 11 November 2019; dan
- Kesepakatan Bersama antara Yayasan Solidaridad Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 12/Pj/KT-PPU/YSNI/2019 dan Nomor 197/174/Tu-Pimp/03/Pem tentang Kemitraan Strategis dalam Mewujudkan Pembangunan di Bidang Pertanian secara Luas di Penajam Paser Utara, tertanggal 13 Januari 2020.

d. Objek Kerjasama :

Objek kerjasama ini adalah identifikasi kesempatan, mendorong komitmen dalam implementasi kerjasama pembangunan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Berau.

e. Nama Kegiatan :

Adapun nama kegiatannya adalah Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur

f. Sumber Pembiayaan :

Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur oleh para pihak berdasarkan ketersediaan sumberdaya dan aturan keuangan para pihak

g. Jangka Waktu Kerjasama :

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani (19 Juni 2020), dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

h. Hasil (Output) dari Kerjasama :

Adapun hasil kerjasama yang diharapkan sebagai berikut :

- Dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- Implementasi program penurunan emisi di Kalimantan Timur (seperti program FCPF-CF dan sejenisnya) pada subsektor perkebunan melalui intervensi pendampingan aksi adaptasi dan mitigasi kepada petani;
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi dan teknis petani di Kalimantan Timur;
- Perencanaan, pengembangan dan pengawasan komoditas perkebunan berkelanjutan didukung dengan pengelolaan data spasial yang baik;
- Kelompok petani pada komoditas utama seperti kelapa sawit siap untuk menerapkan standar berkelanjutan ISPO dan persiapan standar yang masih berproses pada komoditas karet dan kakao; dan
- Terselenggaranya seminar, konferensi, dan sejenisnya untuk mempromosikan topik komoditas perkebunan berkelanjutan, terutama terkait dengan kesejahteraan petani.

i. Permasalahan dan Solusi : -

Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan : -

BAB V PENUTUP

Secara umum, pencapaian sasaran strategis kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sudah mencapai 115,22% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun untuk pencapaian sasaran perangkat daerah yang pertama yakni meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan secara persentase belum maksimal jika dibandingkan dengan 2 sasaran lainnya yang tercapai lebih dari 100%. Capaian sasaran pertama mencapai 88,81% dari target. Pencapaian target ini dipengaruhi oleh dampak pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia bahkan di dunia pada tahun 2020. Sasaran kedua yakni meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan tercapai 116,98% dari target atau sebanyak 62 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sedangkan sasaran ketiga yakni meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP perkebunan rakyat sebesar 151,04% atau tercapai 139,85% dari target.

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Program dan kegiatan prioritas tahun 2021 antara lain:

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat, terutama 5 komoditi unggulan perkebunan, yaitu Kelapa sawit, karet, kelapa, kakao dan lada. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian. Kegiatan ini melaksanakan peremajaan karet 100 ha, intensifikasi karet 100 Ha, intensifikasi kelapa 20 Ha, intensifikasi kelapa sawit 100 Ha, intensifikasi lada

150 Ha, rehabilitasi lada 50 Ha, peremajaan kakao 50 Ha, dan intensifikasi kakao 150 Ha.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan perluasan kakao 100 ha, perluasan karet 200 Ha, perluasan kelapa 20 Ha, perluasan kelapa sawit 200 Ha, perluasan lada 100 Ha, dan perluasan pala 50 Ha.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Provinsi.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan. Pencapaian program tersebut didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- b. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian; dan
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Selain itu juga dilakukan kegiatan penunjang, seperti sosialisasi maupun pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap budidaya, penanganan hama dan penyakit,

penyediaan bahan tanaman maupun pengawasan peredaran dan sertifikasi benih.

Dengan demikian jika dilihat dari keseluruhan pencapaian program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah merefleksikan dan sesuai dengan perencanaan jangka menengah (RPJMD), RKPD, Renstra dan Renja.